

## **Laporan Akhir**

# **STUDI EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PKPS BBM IP) TAHUN 2005**

Agreement No.7137799

Conducted By

***LP3ES***

Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial  
*Institute for Social and Economic Research, Education & Information*  
Jl. S. Parman 81 Slipi Jakarta 11420

**2006**

**TIM PENELITIAN :**

**Ketua:**

Erfan Maryono

**Anggota :**

Martini Dwi Edithia

V. Prasetyo Suseno

Cholidin A. Yani

Harris Syarman

Livius Prabowo

Agustinus Harefa

Iwan Suharmawan

M. Yusuf

Suyatno

Mustafa Getteng

Srie Mulyasari

Tauhid Ahmad

Slamet Riyadi

## UCAPAN TERIMAKASIH

Laporan ini dapat diselesaikan atas bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bambang Widiyanto dan Bapak Pungki Sumadi, dari Bappenas atas dukungan yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada Bapak Djoko Muryanto dan Bapak Panani Kesai dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yang telah memberikan informasi yang berharga dan memperlancar akses data. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Susan Wong, Jennifer Donohoe, Kathy Macpherson, Sandra Usmany Tjan dan Ari Siregar dari Bank Dunia yang telah memberi saran-saran, memfasilitasi dan memberi arahan teknis dalam pelaksanaan penelitian ini.

Ucapan terimakasih, juga kami sampaikan kepada semua responden yang terlibat dalam kajian ini atas kesediaan untuk memberikan informasi dan pendapat dalam kajian ini. Secara khusus, kami menghargai bantuan yang diberikan oleh Satker Kabupaten dan Propinsi, Pengurus OMS dan masyarakat luas di lokasi studi. Penghargaan juga kami sampaikan kepada berbagai pihak lain yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga guna memberikan informasi, serta hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi-diskusi yang dilaksanakan selama kajian ini.

## KATA PENGANTAR

Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan A Rapid Evaluation Of The BBM Fuel Compensation Scheme Village Infrastructure Program 2005 yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dukungan The World Bank Jakarta.

Studi ini dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yakni; Tahap pertama, berlangsung dari pada bulan Pebruari- Maret 2006 di 48 desa sampel yang tersebar di 12 kabupaten, yang berada di 4 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur dan Tahap kedua, berlangsung pada bulan April - Mei 2006 di 52 desa sampel yang tersebar di 9 kabupaten, yang berada di 3 provinsi, yaitu Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Laporan ini terdiri dari empat bab, yakni terdiri dari Bab1. Pendahuluan, Bab II. Gambaran Umum PKPS BBM IP, Bab.III. Hasil Studi, dan Bab IV. Kesimpulan dan Rekomendasi. Laporan ini memang masih belum sempurna, untuk itu kami mengundang kritik dan saran dari anda sekalian untuk penyempurnaannya

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bappenas dan The World Bank Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada LP3ES untuk terlibat dalam kegiatan ini. Tak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung kegiatan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Kami berharap agar studi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Jakarta, Agustus 2006

Erfan Maryono

Ketua Tim

## DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif .....	1
<b>Bab I PENDAHULUAN.....</b>	<b>10</b>
1.1 Latar Belakang .....	10
1.2 Tujuan Studi .....	11
1.3 Metodologi Studi .....	12
1.3.1 Lokasi Studi .....	12
1.3.2 Metode Pengumpulan Data .....	13
1.3.2.1 Data Sekunder .....	13
1.3.2.2 Data Primer .....	13
1.3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	20
1.4 Teknik Analisis Data .....	22
1.5 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Studi .....	24
1.5.1 Tahap Persiapan .....	24
1.5.2 Tahap Kegiatan Lapangan .....	25
1.5.3 Tahap Kompilasi Data, Analisis dan Penyusunan Laporan .....	26
1.5.4 Supervisi Kegiatan Lapangan .....	26
1.6 Pelaporan .....	26
<b>Bab II GAMBARAN UMUM PROGRAM PKPS BBM-IP .....</b>	<b>29</b>
2.1 Latar Belakang .....	29
2.2 Maksud .....	29
2.3 Tujuan .....	29
2.4 Sasaran .....	30
2.5 Ruang Lingkup .....	30
2.6 Prinsip Dan Pendekatan .....	30
2.6.1 Prinsip .....	30
2.6.2 Pendekatan .....	31
2.7 Mekanisme Penentuan Sasaran .....	31
2.8 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana .....	32
<b>Bab III HASIL STUDI .....</b>	<b>34</b>
3.1 Gambaran Umum Kemajuan Pelaksanaan Program .....	34
3.2 Pemilihan Lokasi Desa dan Jenis Infrastruktur .....	39
3.2.1 Proses dan Penetapan Lokasi Desa Penerima Program .....	39
3.2.2 Proses Penjaringan Usulan, Penetapan Jenis dan Lokasi Infrastruktur .....	43
3.3 Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Infrastruktur .....	48
3.3.1 Jenis Kegiatan Yang Didanai .....	49
3.3.2 Pola Pelaksanaan Pembangunan .....	57
3.3.3 Tingkat Keberfungsian dan Kualitas Infrastruktur Yang Dibangun .....	60
3.3.4 Perencanaan dan Kesiapan Pengelolaan dan Pemeliharaan .....	62
3.4 Komposisi Penggunaan Dana dan Efektifitas Pembiayaan .....	64
3.4.1 Jumlah Dana PKPS BBM IP .....	64
3.4.2 Proses Pencairan Dana .....	64
3.4.3 Administrasi/Pelaporan dan Bukti Penggunaan Dana .....	66
3.4.3.1 Administrasi/Pelaporan .....	66
3.4.3.2 Bukti Penggunaan Dana .....	67
3.4.4 Jenis dan Besar Penggunaan Dana .....	70
3.4.5 Efektifitas Penggunaan Dana .....	73

3.5	Dampak Program Pembangunan dalam Jangka Pendek .....	77
3.5.1	Dampak terhadap terbukanya akses dan kemudahan masyarakat .....	77
3.5.2	Jenis dan Jumlah Pemanfaat .....	79
3.5.3	Dampak Proyek Terhadap Ketenagakerjaan .....	81
3.5.4	Dampak Proyek Terhadap Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pelaku Pemerintah .....	83
3.6	Implementasi Isu Tata Pemerintahan ( <i>Governance Issue</i> ) .....	85
3.6.1	Transparansi Informasi dan Pola Komunikasi .....	85
3.6.2	Tingkat Kepuasan Stakeholder .....	88
3.6.3	Bentuk dan Mekanisme Pengaduan .....	91
3.7	Pelaksanaan Program Secara Keseluruhan .....	92
3.7.1	Kesesuaian Prosedur .....	92
3.7.2	Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan .....	94
3.7.3	Pelaksanaan Supervisi .....	95
<b>Bab IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>98</b>
4.1	Kesimpulan .....	98
4.2	Rekomendasi .....	102

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Lokasi Desa Sampel Rapid Evaluasi PKPS BBM IP .....	15
Tabel 1.2	Data dan Sumber Informasi .....	19
Tabel 3.1	Rekapitulasi desa berdasarkan kemajuan dan rata-rata Penyerapan dana per provinsi lokasi penelitian.....	36
Tabel 3.2	Rekapitulasi Jumlah desa berdasarkan kemajuan pembangunan prasarana (per provinsi).....	36
Tabel 3.3	Persentase Penyerapan dana pada desa yang pembangunan Fisik prasarananya sudah mencapai 100%.....	37
Tabel 3.4	Persentase Penyerapan Dana pada desa yang pembangunan prasarananya belum 100%.....	39
Tabel 3.5	Daftar kabupaten sampel penelitian menurut jumlah desa total dan penerima per kabupaten, serta ketidaktepatan dalam penentuan lokasi.....	42
Tabel 3.6	Daftar kabupaten sampel penelitian menurut jumlah desa total dan penerima per kabupaten, serta ketidaktepatan dalam penentuan lokasi pada desa-desa sampel penelitian.....	43
Tabel 3.7	Jumlah desa berdasarkan frekwensi musyawarah desa dan topik yang dibahas.....	45
Tabel 3.8	Proses Pembentukan OMS.....	47
Tabel 3.9	Proses Pengambilan Keputusan infrastruktur yang akan dibangun.....	48
Tabel 3.10	Ragam dan jumlah infrastruktur yang dibangun diseluruh wilayah sampel Penelitian.....	50
Tabel 3.11	Jenis infrastruktur dan tingkat penyelesaian pembangunannya di desa studi di Sumatera Utara.....	51
Tabel 3.12	Jenis infrastruktur dan tingkat penyelesaian pembangunannya di desa studi di Jawa Tengah.....	52
Tabel 3.13	Jenis infrastruktur dan tingkat penyelesaian pembangunannya di desa studi di Kalimantan Barat.....	53
Tabel 3.14	Jenis infrastruktur dan tingkat penyelesaian pembangunannya di desa studi di NTT.....	54
Tabel 3.15	Jenis infrastruktur dan tingkat penyelesaian pembangunannya di desa studi di Jawa Timur.....	55
Tabel 3.16	Jenis infrastruktur dan tingkat penyelesaian pembangunannya di desa studi di Sulawesi Selatan.....	56
Tabel 3.17	Jenis infrastruktur dan tingkat penyelesaian pembangunannya di desa studi di Lampung.....	57
Tabel 3.18	Pola Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik.....	58
Tabel 3.19	Pola Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Secara Swakelola.....	58
Tabel 3.20	Keberfungsian Infrastruktur yang telah selesai dikerjakan (100%).....	60
Tabel 3.21	Kualitas Infrastruktur yang telah selesai dikerjakan (100%).....	62
Tabel 3.22	Keberadaan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur .....	63
Tabel 3.23	Pungutan dan waktu dalam proses pencairan dana.....	66
Tabel 3.24	Kelengkapan Administrasi Penggunaan Dana .....	68
Tabel 3.25	Bukti Penggunaan Dana Bagi Desa Yang Telah Mendapatkan Dana Rp 250 Juta.....	69
Tabel 3.26	Bukti Penggunaan Dana Bagi Desa Yang Telah Mendapatkan Dana Rp 100 Juta dan Rp 200 juta.....	70
Tabel 3.27	Alokasi Penggunaan Dana Menurut RAB (dalam %)......	71
Tabel 3.28	Komposisi desa berdasarkan pola pencantuman Biaya Operasional OMS dalam RAB (jumlah desa).....	72
Tabel 3.29	Penggunaan Dana BOP OMS.....	72
Tabel 3.30	Tingkat Efektivitas biaya infrastruktur yang telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100% (per desa).....	74
Tabel 3.31	Status Prasarana yang telah selesai 100%.....	78
Tabel 3.32	Status Prasarana Jalan dan Jembatan Yang telah selesai 100%.....	79
Tabel 3.33	Jumlah Prasarana yang dibangun serta jumlah pemanfaat (KK).....	80

Tabel 3.34	Kondisi Penyerapan tenaga Kerja dalam Hal total upah per desa, jumlah tenaga terserap, lama pekerjaan dan upah per hari berdasarkan provinsi.....	82
Tabel 3.35	Kriteria yang digunakan dalam memilih tenaga kerja.....	83
Tabel 3.36	Keberadaan Swadaya Masyarakat.....	84
Tabel 3.37	Jenis Swadaya Masyarakat.....	85
Tabel 3.38	Transparansi Informasi Program.....	87
Tabel 3.39	Kepuasan Warga Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Khusus bagi desa yang pekerjaan fisik telah selesai 100%.....	89
Tabel 3.40	Kepuasan OMS terhadap Pelaksanaan Program.....	90
Tabel 3.41	Tingkat Kepuasan Satker Kabupaten.....	91
Tabel 3.42	Perbandingan Peran Stakeholders antara Pedoman dan Realisasi.....	93
Tabel 3.43	Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Program (Berdasarkan Provinsi).....	95
Tabel 3.44	Pihak-Pihak Yang melaksanakan Supervisi.....	96
Tabel 3.45	Frekwensi Supervisi.....	97



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Lokasi Studi Penelitian .....	18
----------	------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Umum Keuangan PKPS BBM IP
Lampiran 2	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan PKPS BBM IP
Lampiran 3	Penggunaan Dana Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Lampiran 4	Penggunaan Dana Yang Mempunyai Bukti Pembelian Barang
Lampiran 5	Rekapitulasi Penggunaan Dana Yang Mempunyai Bukti Pembelian Barang
Lampiran 6	Data Umum Teknik PKPS BM IP
Lampiran 7	Komponen Biaya PKPS BBM IP
Lampiran 8	Prasarana Yang dibangun dalam program PKPS BBM IP
Lampiran 9	Komponen Tenaga Kerja Yang Terserap
Lampiran 10	Komponen Kontribusi Swadaya Masyarakat
Lampiran 11	Laporan Propinsi Sumatera Utara
Lampiran 12	Laporan Propinsi Jawa Tengah
Lampiran 13	Laporan Propinsi Kalimantan Barat
Lampiran 14	Laporan Propinsi Nusa Tenggara Timur
Lampiran 15	Laporan Propinsi Jawa Timur
Lampiran 16	Laporan Propinsi Sulawesi Selatan
Lampiran 17	Laporan Propinsi Lampung
Lampiran 18	Profil Desa (100 desa)

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPPD	:	Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana
BKU	:	Buku Kas Umum
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bappeprop	:	Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi
Bappekab	:	Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Bapedes	:	Badan Pembangunan Desa
BAKKP	:	Berita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan Penyelesaian
BASPK	:	Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan
BOP	:	Biaya Operasional dan Pemeliharaan
BPKP	:	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DIPA	:	Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FK	:	Fasilitator Kecamatan
FGD	:	Focus Group Discussion
Jatim	:	Jawa Timur
Jateng	:	Jawa Tengah
Juklak	:	Petunjuk Teknis
KAB	:	Kabupaten
Kalbar	:	Kalimantan Barat
KEC	:	Kecamatan
KD	:	Kader Desa
KME	:	Konsultan Monitoring dan Evaluasi
KMPr	:	Konsultan Manajemen Propinsi
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	:	Konsultan Pendampingan Kabupaten/Kota
KPP	:	Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
KPPN	:	Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara
KPT	:	Konsultan Pembinaan Teknis
KSO	:	Kerja Sama Operasional
LKD	:	Lembaga Kemasyarakatan Desa
LP2K	:	Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
LPD	:	Laporan Penggunaan Dana
Musrembang	:	Musyawaharah Pembangunan
Mudes	:	Musyawaharah Desa
NTT	:	Nusa Tenggara Timur
OMS	:	Organisasi Masyarakat Setempat
Ormas	:	Organisasi Masyarakat
OP	:	Operasional dan Pemeliharaan
Pemda	:	Pemerintah Daerah
PDT	:	Pembangunan Daerah Tertinggal
PK	:	Pembuat Komitmen
PODES	:	Potensi Desa

PTO	:	Pedoman Teknis Operasional
PP	:	Penguji Pembebanan
PPA	:	Pejabat Pengguna Anggaran
PKPS BBM	:	Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak
Pokmas	:	Kelompok Masyarakat
PSPM	:	Penandatanganan Surat Perintah Membayar
PU	:	Pekerjaan Umum
RAB	:	Rencana Anggaran dan Biaya
RKB	:	Realisasi Kegiatan dan Biaya
RPD	:	Rencana Penggunaan Dana
RT	:	Rukun Tetangga
RW	:	Rukun Warga
Satker	:	Satuan Kerja
SE	:	Surat Edaran
SP3	:	Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
SP3K	:	Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
SNPK	:	Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPPD	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPKMP	:	Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan
Sulsel	:	Sulawesi Selatan
Sumut	:	Sumatera Utara
TKK	:	Tim Koordinasi Kabupaten/Kota
TKN	:	Tim Koordinasi Nasional
TKP	:	Tim Koordinasi Pusat
TKPr	:	Tim Koordinasi Propinsi
TTU	:	Timor Tengah Utara
TTS	:	Timor Tengah Selatan
UPM	:	Unit Pengaduan Masyarakat

**STUDI EVALUASI  
PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK  
BIDANG INFRASTRUKTUR PERDESAAN  
TAHUN 2005**

**Ringkasan Eksekutif**

Studi Evaluasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan 2005, dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan studi lapangan, Tahap pertama, berlangsung pada bulan Pebruari - Maret 2006 di 48 desa sampel yang tersebar di 12 kabupaten, yang berada di 4 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur dan Tahap kedua, berlangsung pada bulan April - Mei 2006 di 52 desa sampel yang tersebar di 9 kabupaten, yang berada di 3 provinsi, yaitu Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji tingkat efektifitas dan manfaat program PKPS BBM IP, mencakup; (a) pelaksanaan program secara keseluruhan, (b) sasaran/seleksi proyek, (c) hasil lapangan, (d) dampak jangka pendek, (e) aliran/penyimpangan penggunaan dana dan (f) tatalaksana program. Ada tiga aspek yang distudi, yaitu aspek teknik, aspek keuangan dan aspek sosial.

Pengumpulan datanya menggunakan metode kuesioner, review aspek teknis, review aspek keuangan serta pemeriksaan teknis dan keuangan. Dilengkapi dengan tinjauan lapangan, *in-depth interview*, *focus group discussion* dan dokumentasi photo. Sumber informasi terdiri dari Satker Provinsi, Satker Kabupaten, kepala desa, pengurus OMS (Ketua, Bendahara dan tim teknis), kader desa, mantan pekerja, tokoh masyarakat, masyarakat desa, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara dan masyarakat penerima manfaat. Sedangkan analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis-kualitatif sebagai dasar pengambilan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi studi ini.

**1. Pelaksanaan Program Secara Keseluruhan**

Program tidak berjalan sesuai dengan mekanisme prosedur yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan. Hal ini antara lain disebabkan karena: waktu pelaksanaan terlalu singkat, peran konsultan tidak efektif, Satker Kabupaten mengambil alih sebagian peran konsultan dan OMS serta kegiatan supervisi yang kurang efektif. Satker Kabupaten melakukan supervisi terhadap OMS seminggu 2 kali di 66 desa (66%), 2 minggu sekali di 21 desa (21%) dan

sebulan sekali di 9 desa (9%). Dalam buku panduan atau Juklak PKPS BBM IP tidak ada ketentuan frekwensi yang dilakukan Satker dalam melaksanakan supervisi.

Musyawarah Desa (Mudes) berlangsung seperti yang tertera dalam pedoman pelaksanaan. Sebanyak 77 desa (77%) melakukan Mudes 3 kali, 13 desa (13%) menyelenggarakan Mudes 2 kali, dan yang menyelenggarakan Mudes satu kali terdapat di 13 desa (13%). Mudes diikuti oleh aparat desa dan tokoh masyarakat. Tidak banyak warga miskin dan kaum perempuan yang ikut serta dalam musyawarah tersebut.

Di 100 desa sampel, masyarakat berkesempatan mengusulkan lokasi dan jenis prasarana fisik, melalui musyawarah desa. Keputusan tentang lokasi dan jenis prasarana fisik yang ditentukan di luar Musyawarah Desa, terjadi di 44 desa (44%).

Masalah yang terjadi di semua provinsi, adalah singkatnya waktu pelaksanaan proyek, hambatan cuaca/musim hujan, ketersediaan dan mobilisasi alat berat, serta lemahnya peran konsultan, masalah pajak hanya terjadi di Jawa Tengah. Kecuali Kalbar, semua provinsi menganggap kelengkapan dan ketersediaan Juklak yang terlambat menjadi masalah dalam pelaksanaan program

## **2. Seleksi Lokasi Desa dan Jenis Prasarana**

Dari 930 desa penerima program di 21 Kabupaten sampel, sebanyak 250 desa (26,9%) diantaranya bukan merupakan desa tertinggal infrastruktur karena peringkatnya diatas rata-rata peringkat indeks ketertinggalan desa (BPS, 2004) di kabupaten yang bersangkutan sehingga tidak tepat sasaran.

Dari 88 desa yang prasarana fisiknya telah selesai dibangun, responden di 51 desa (58,0%) menyatakan puas terhadap pemilihan lokasi dan jenis prasarana yang telah selesai dibangun karena sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Sedangkan responden di 33 desa (38,0%) merasa kurang puas dan responden di 4 desa (5,0%) merasa tidak puas terhadap pemilihan lokasi dan jenis prasarana yang telah selesai dibangun karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilihan lokasi dan jenis prasarana yang dibangun di 51 desa sampel sudah tepat sasaran.

## **3. Hasil Kegiatan di Lapangan**

Total seluruh prasarana yang dibangun di desa sampel berjumlah 441 unit. Sebagian besar berupa *jalan* 293 unit (66,4%) diikuti 62 unit *sarana air bersih* (14,1%), 51 unit *jembatan* (11,6%), 26 unit *irigasi/drainase* (5,9%) dan 9 unit *tambatan perahu* (2%). Dari 441 unit prasarana yang dibangun baru 379 unit yang selesai dibangun, terdiri dari 221 unit jalan, 29 unit

jembatan, 55 unit air bersih, 24 unit irigasi dan 9 unit tambatan perahu. Semua fisik prasarana yang dibangun tersebut dapat berfungsi dengan baik kecuali satu jembatan di Jawa Tengah dan 2 sarana air bersih di Jawa Timur.

Di 89 desa (89%) pembangunannya menggunakan pola swakelola, artinya pelaksanaan pembangunan dikerjakan langsung oleh OMS/masyarakat. Yang menggunakan pola KSO, yaitu pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan oleh OMS/masyarakat tetapi untuk pekerjaan yang tidak bisa dilakukan masyarakat dibantu oleh pihak ketiga, sebanyak 11 desa (11%). Tidak ada yang menggunakan pola Kontraktual. Dari 89 desa yang menggunakan pola swakelola, 26 desa diantaranya (29,2%) merupakan "*swakelola semu*" yaitu pelaksanaan pembangunannya bekerjasama dengan pihak ketiga, tetapi secara resmi dilaporkan sebagai swakelola.

Kriteria penilaian kualitas prasarana adalah jika didesa terdapat lebih dari 2 prasarana yang dibangun maka penilaian untuk mutu teknis dilakukan dengan kriteria alokasi anggaran terbesar dan jumlah pemanfaat terbanyak. Dari ketentuan tersebut maka di 100 desa sampel, dari 379 unit prasarana yang telah selesai dibangun, studi ini menilai kualitas prasarana sebanyak 151 unit prasarana. Sebanyak 76 unit prasarana (50,3%) diantaranya termasuk dalam kategori baik. Artinya prasarana yang dibangun telah memenuhi standar teknis minimal. Sedangkan 46 unit prasarana (30,5%) berkualitas cukup dan 29 unit prasarana (19,2%) termasuk dalam kategori jelek. Dari 29 unit prasarana yang kualitasnya jelek tersebut, 27 unit diantaranya adalah prasarana jalan.

Di semua desa sampel studi (100 desa), telah terbentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) untuk menangani Operasional dan Pemeliharaan (O&P). Dari jumlah tersebut, hanya 44 desa yang memiliki rencana O&P dan baru 22 desa telah melakukan kegiatan O&P secara riil.

Lebih dari setengah desa sampel (51 desa), masyarakatnya memberikan kontribusi swadaya, tidak ada catatan tentang nilai swadaya ini. Bentuk swadayanya berupa kerja bakti, upah rendah dan sumbangan material.

#### **4. Aliran Dana & Efektifitas Pembiayaan**

Sampai dengan studi dilaksanakan (Mei 2006), baru 70 desa sampel yang telah menerima dana atau melakukan pencairan dana PKPS-BBM IP sebesar Rp 250 juta, sedangkan 30 (tigapuluh) desa sampel lainnya baru menerima dana tahap I (Rp 100 juta ada 13 desa) dan tahap II (Rp 200 juta ada 17 desa).

Dalam hal administrasi/pembukuan, hanya 74 desa (74%) dari 100 desa sampel yang OMS nya memiliki buku kas umum. Desa-desanya yang tidak membuat buku kas tidak berarti tidak memiliki bukti penggunaan dana, walaupun juga tidak lengkap. Bukti penggunaan dana dikatakan “lengkap” jika total pengeluaran dana berupa nota pembelian barang dari rekanan maupun dari toko dan daftar upah (HOK) yang dapat dipertanggungjawabkan berjumlah Rp 250 juta.

Dari 70 desa yang telah menerima dana Rp 250 juta, hanya 9 desa (13%) yang memiliki nota pembelian sebagai bukti pengeluaran dana sebesar Rp 250 juta, 41 desa (59%) memiliki nota pembelian sebagai bukti penggunaan dana antara Rp 201 juta,- s/d < Rp 250 juta -, dan 20 desa (28%) hanya memiliki nota pembelian sebagai bukti penggunaan dana antara Rp 0,- s/d Rp 200 juta.

Proses pencairan dana yang memerlukan waktu kurang dari 1 (satu) minggu berlangsung di 48 desa (48%), antara 1-2 minggu berlangsung di 46 desa (46%), hanya 6 desa (6%) yang proses pencairan dananya memerlukan waktu lebih dari 2 minggu. Dalam proses pencairan dana, ditemukan pengakuan adanya pemberian uang jasa, di 3 desa di Kalbar dan 8 desa di Sulsel. OMS mengaku membayar uang jasa dalam proses pencairan dana kepada pihak-pihak tertentu, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pencairan dana.

Penilaian atas cost effectiveness dilakukan dengan cara membandingkan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan hasil tinjauan fisik dilapangan. Disebut menggunakan dana secara efektif jika selisih antara RAB dengan penilaian teknis hasil peninjauan lapangan, tidak lebih dari 4%. Dari 76 desa yang pembangunan prasarananya telah selesai dikerjakan, 41 desa (53,9%) diantaranya menggunakan dananya secara efektif. Sisanya 35 desa (46,1%) dikategorikan tidak efektif dalam menggunakan dana (selisihnya antara 4,3% - 45,9%). Indikasi adanya penyimpangan penggunaan dana terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Sulawesi Selatan. Indikasi penyimpangan dana terlihat dengan adanya “mark up” terhadap harga pembelian material, pembayaran upah tenaga kerja dalam bentuk HOK padahal dilaksanakan secara borongan dan penggunaan material dengan kualitas yang kurang baik.

Dari 100 desa sampel, hanya 74 desa (74%) yang mencantumkan biaya operasional Organisasi Masyarakat Setempat (BOP OMS) dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), 26 desa (26%) lainnya melakukan markup harga material ataupun HOK untuk memenuhi kebutuhan dana biaya operasional (BOP) OMS. BOP OMS digunakan untuk biaya transport anggota OMS, insentif, biaya survey/pengukuran, biaya mudes dan pelaporan/dokumentasi.



## 5. Dampak Jangka Pendek

Dampak nyata dalam membuka akses mobilitas orang dan barang keluar masuk desa terdapat pada pembangunan jalan dan jembatan yang merupakan poros desa (11,3%) dan yang berstatus baru (13,1%). Kemanfaatan yang nyata pada tiap keluarga terlihat dalam penyediaan air bersih (45 KK per unit) dan irigasi (85 KK per unit). Proyek dapat menyerap tenaga kerja desa setempat dengan jumlah tenaga kerja bervariasi antara 25 sampai 632 orang, dengan upah antara Rp 10.000 sampai Rp 75.000,- orang/hari dengan lama kerja antara 3 sampai 45 hari. Dalam pemilihan tenaga kerja, kriteria yang digunakan adalah memprioritaskan warga sedesa (48%), warga disekitar lokasi proyek (30%), warga miskin (9%), pengangguran (7%) dan perempuan (1%). Dalam pelaksanaan proyek, tidak terjadi peningkatan kapasitas masyarakat secara nyata.

## 6. Tata Laksana Program (*Governance issue*)

Dalam hal transparansi informasi, sebagian besar masyarakat mengetahui jumlah dana yang diterima desa sebesar Rp 250 juta, terdapat di 68 desa (68%). Tetapi di 94 desa (94%) sebagian besar masyarakat tidak mengetahui realisasi penggunaan dananya. Masyarakat memperoleh informasi program hanya melalui mudes. Proyek tidak menyediakan mekanisme secara rinci tentang pengaduan masyarakat. Sebagian besar masyarakat puas 46 desa (60,5%) dengan kualitas prasarana yang dibangun. Hanya 23 desa (23%) OMS yang puas dengan kinerja konsultan. Dan hanya 3 desa (14,3%) Satker Kabupaten yang menyatakan puas terhadap kinerja konsultan.

Walaupun dalam pelaksanaan masih banyak terdapat kelemahan, dilihat dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan prasarana di desa tertinggal, PKPS BBM IP ini dirasakan manfaatnya terutama oleh desa tertinggal yang belum pernah menerima bantuan langsung dari pemerintah dengan jumlah yang relatif besar (Rp 250 Juta) yang memberikan kesempatan pada warga setempat untuk membangun sesuai dengan kebutuhannya sendiri.

## 7. Rekomendasi untuk Perbaikan Program

Agar pelaksanaan PKPS BBM IP dalam penyediaan prasarana perdesaan di desa tertinggal dapat berlangsung lebih efektif, perlu adaya perbaikan-perbaikan sebagai berikut :

1. Perlu penajaman sasaran desa penerima program. Program hanya diberikan pada desa yang jumlah penduduk miskinnya besar (diatas rata-rata angka kabupaten yang bersangkutan). Pemilihan desa harus menggunakan basis data dan kriteria yang sama

antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten.

2. Tujuan program perlu dipertajam menjadi “*penyediaan prasarana perdesaan yang paling dibutuhkan warga setempat, yang fungsional dan berkelanjutan*”. Pelibatan warga dan penyerapan tenaga kerja dalam program ini harusnya diposisikan sebagai strategi (*approach*) pelaksanaan, bukan tujuan program.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana, harus dipilih pola yang bisa menjamin kualitas dan kefungsian prasarana secara berkelanjutan. Jika masyarakat setempat belum mampu, *tidak perlu dipaksakan dengan pola swakelola*.
4. Perlu *memisahkan secara tegas* antara fungsi pelaksana kegiatan dengan fungsi pengawasan/supervisi. Khusus berkenaan dengan administrasi keuangan, untuk mencegah terjadinya “*penyimpangan penggunaan dana*”, perlu penyempurnaan *pedoman pelaksanaan, mekanisme dan prosedur penggunaan dan harus ada pertanggungjawaban dana*. Selain itu, juga dibutuhkan pengawasan dalam mengimplementasikan pedoman tersebut secara konsisten.
5. Tingkat kebutuhan masyarakat akan pendampingan tidak sama, tergantung pengalamannya mengerjakan proyek serupa. Agar pendampingan lebih efektif, tidak boros dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, yang dibutuhkan masyarakat adalah *tenaga pendamping teknik yang memiliki keterampilan melakukan pendekatan sosial*.
6. Berkenaan dengan *governance issues*, OMS sebagai “*pelaksana proyek*” yang dipilih dan dibentuk masyarakat harus *mempertanggungjawabkan kualitas prasarana dan penggunaan dananya pada masyarakat luas* melalui musyawarah desa / papan informasi. Fungsi musyawarah desa harus ditekankan pada *pengambilan keputusan oleh masyarakat sendiri*. Satker, Kepala Desa, dan konsultan berperan memfasilitasi proses pengambilan keputusan tersebut menyangkut jenis dan lokasi terhadap dana yang tersedia.



### MATRIK TEMUAN STUDI

Pertanyaan Studi	Temuan
<b>1. Pelaksanaan program secara keseluruhan:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah program berjalan sesuai dengan mekanisme/prosedur dan tujuannya?</li> </ul>	<p>Program berjalan tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur, karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Waktu pelaksanaan terlalu singkat</li> <li>○ Peran konsultan tidak efektif</li> <li>○ Satker mengambil alih sebagian peran konsultan dan OMS</li> <li>○ Supervisi tidak efektif</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah musyawarah desa berjalan sesuai dengan yang direncanakan? <i>Dari 100 desa sampel yang disurvei</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mudes berlangsung sesuai juklak.</li> <li>▪ 77% berlangsung 3 kali, 13% berlangsung 2 kali dan 10% berlangsung 1 kali.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana proyek dipilih?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melalui Mudes 56%, melalui Mudes dengan intervensi Kades dan Satker 44%</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apa saja masalah yang ditemui selama pelaksanaan program?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan waktu, musim hujan, konsultan terlambat, juklak tidak lengkap dan terlambat, dan kepastian BOP OMS.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana supervisi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dan seberapa sering dilakukan? <i>Tidak ada ketentuan dalam Pedoman PKPS BBM IP berapa kali/frekuensi dalam melaksanakan supervisi</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Supervisi dilakukan oleh Satker Kab, seminggu sekali (66%), 2 minggu sekali (21%), sebulan sekali (9%).</li> </ul>
<b>2. Sasaran/ seleksi lokasi target :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana 12.834 desa dipilih?, apakah sesuai dengan kriteria kemiskinan? <i>Didalam Juklak penentuan kriteria alokasi jumlah desa terbatas pada Kab/Kota tertinggal non tertinggal, sehingga perlu kriteria lain yang dapat mendukung maksud dan tujuan program.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dari 21 kabupaten sampel, total desa penerima program adalah 930 desa.</li> <li>▪ 250 desa (26,9 %) diantaranya tidak tepat sasaran. Desa-desa tersebut peringkatnya diatas rata-rata indeks ketertinggalan desa di Kabupaten yang bersangkutan (BPS 2004).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Di mana lokasi proyek?, dan apakah proyek tersebut juga bermanfaat bagi orang miskin?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi dan jenis proyek sesuai dengan kebutuhan dan usulan masyarakat (termasuk warga miskin)</li> </ul>
<b>3. Hasil/output di lapangan :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis kegiatan apa saja yang didanai dari Rp. 250 juta per desa?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Total prasarana yang dibangun berjumlah 441 unit.</li> <li>▪ Jalan 293 unit (66,4%), sarana air bersih 62 unit (14,1%), jembatan 51 unit (11,6%), irigasi/drainase 26 unit (5,9%), dan tambatan perahu 9 unit (2%).</li> <li>▪ Pola pelaksanaan: swakelola (89 desa, 89%) dan 11 desa (11%) menggunakan KSO. Swakelola terdiri dari swakelola murni (63 desa, 71%) dan swakelola semu (26 desa, 29%).</li> </ul>

Pertanyaan Studi	Temuan
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana kualitas hasil infrastruktur? <i>Kriteria penilaian kualitas prasarana adalah jika didesa terdapat lebih dari 2 prasarana yang dibangun maka penilaian untuk mutu teknis dilakukan dengan kriteria alokasi anggaran terbesar dan jumlah pemanfaat terbanyak.</i> <i>Yang distudi/ dinilai kualitasnya hanya 151 unit prasarana</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah prasarana yang dibangun 441 unit prasarana, 379 unit prasarana diantaranya telah selesai dibangun. Dari 379 unit prasarana, 151 unit prasarana yang dinilai kualitasnya.</li> <li>▪ 76 unit prasarana (50,3%) kualitasnya baik (memenuhi standar teknis minimum), 46 unit (30,5%) cukup, 29 unit (19,2%) jelek.</li> <li>▪ Dari 29 unit prasarana yang jelek, 27 unit diantaranya adalah prasarana jalan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah sudah ada pengaturan O&amp;M?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 desa (100%) telah membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP).</li> <li>▪ 44 desa (44%) telah memiliki rencana O&amp;P.</li> <li>▪ 22 desa (22%) telah melakukan kegiatan O&amp;P.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah ada kontribusi swadaya masyarakat?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 51 desa (51%) ada kontribusi swadaya masyarakat ( kerja bakti, upah rendah dan sumbangan material).</li> </ul>
<p><b>4. Aliran/penyimpangan penggunaan dana dan efektifitas dalam pembiayaan proyek :</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah dana Rp. 250 juta digunakan sebagaimana mestinya?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dari 70 desa yang telah menerima dana Rp 250 juta, 9 desa (13%) memiliki bukti penggunaan dana Rp 250 juta, 41 desa (59%) memiliki bukti penggunaan dana sebesar Rp 201 juta s/d &lt; Rp 250 juta dan 20 desa (28%) hanya memiliki bukti penggunaan dana sebesar Rp 0 s/d Rp 200 juta.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah desa menerima total Rp.250 juta/desa?, jika tidak, berapa jumlah sebenarnya yang diterima desa?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 70 desa sampel menerima dana sebesar Rp 250 juta dalam 3 tahap pencairan dana dan 30 desa lainnya baru menerima dana tahap 1 (Rp 100 juta ada 13 desa) dan tahap 2 (Rp 200 juta ada 17 desa)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana waktu pencairan dana?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 48 desa (48%) memerlukan waktu 1 minggu, 46 desa (46%) memerlukan waktu 1-2 minggu dan 6 desa (6%) memerlukan waktu lebih dari 2 minggu.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah dana tersebut digunakan secara efektif? <i>(efektif jika selisih antara RAB dengan penilaian teknis basil peninjauan lapangan, tidak Lebih dari 4%)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dari 76 desa yang pekerjaan fisiknya selesai 100%, 41 desa (53,9%) menggunakan dana secara efektif .</li> </ul>
<p><b>5. Dampak jangka pendek yang menyangkut :</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan akses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jalan dan jembatan baru (13,1%) yang berstatus poros desa (11,3%) mampu meningkatkan mobilitas orang dan barang keluar masuk desa.</li> <li>▪ KK pemanfaat langsung prasarana air bersih (45 KK/unit), irigasi (85</li> </ul>

Pertanyaan Studi	Temuan
	KK/unit).
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyerap tenaga kerja dengan kisaran perdesa: 25 – 632 org, upah/hari antara Rp.10.000- Rp.75.000,- per orang dengan lama kerja antara 3 – 45 hari.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan pelaku dari pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat</li> </ul>
<b>6. Tata laksana program :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transparansi informasi Apakah masyarakat mengetahui program ini? Apakah informasi program tersedia kepada Publik? Apakah masyarakat tahu bagaimana kegiatan dipilih di desanya? Apakah pertemuan masyarakat benar-benar dilaksanakan?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Di 68 desa (68%) sebagian masyarakat mengetahui desanya menerima dana sebesar Rp.250 juta.</li> <li>▪ Di 76 desa (76%) sebagian besar masyarakat mengetahui proyek dikerjakan oleh OMS.</li> <li>▪ Di 56 desa (56%) sebagian besar masyarakat mengetahui perlunya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek.</li> <li>▪ Di 94 desa (94%) sebagian besar masyarakat tidak mengetahui realisasi penggunaan dana.</li> <li>▪ Masyarakat memperoleh Informasi Program melalui Mudes.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengaduan – Apakah mekanisme penanganan pengaduan sudah ada dan apakah masyarakat tahu harus kemana menyalurkan pengaduannya?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada mekanisme operasional dalam penanganan pengaduan masyarakat.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat kepuasan stakeholder. Apakah stakeholder (PU, TK, aparat ditingkat daerah, masyarakat pemanfaat) puas dengan pelaksanaan program? Apa pendapat mereka terhadap program?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat puas dengan jenis dan lokasi prasarana 51 desa (58%), puas dengan kualitas prasarana 41 desa (47%). Tidak termasuk NTT karena belum 100%.</li> <li>▪ OMS puas dengan pelibatan masyarakat (57%), puas dengan peran konsultan (23%), puas dengan fasilitasi Kades (56%), puas dengan peran Satker Kab (53%)</li> <li>▪ Satker, puas dengan kinerja konsultan 3 desa (14,3%), puas dengan kerja OMS 13 desa (61,9%), puas dengan kualitas prasarana 14 desa (66,6%), puas dengan pemilihan jenis dan lokasi prasarana 18 desa (85,7%).</li> </ul>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditandai dengan penetapan kenaikan harga BBM pada bulan Mei dan Oktober 2005. Kebijakan pengurangan subsidi BBM ini didukung dengan penyelenggaraan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) yang diwujudkan dalam beberapa program yang sesuai dan sejalan dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Dalam SNPK menitikberatkan pada bidang kesehatan, pendidikan dan penyediaan kebutuhan dasar seperti infrastruktur, sanitasi, lingkungan dan gender. Dengan demikian pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan menjadi salah satu program utama dalam penanggulangan kemiskinan di desa-desa tertinggal. Salah satu dari rencana skala besar program infrastruktur desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Departemen Pekerjaan Umum/PU) untuk mendukung penyelenggaraan PKPS BBM yang sesuai dengan SNPK adalah “Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan” atau PKPS BBM-IP. Penyelenggaraan PKPS BBM-IP diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan wilayah perdesaan melalui pertumbuhan ekonomi lokal sehingga dapat mengurangi dampak yang diakibatkan kebijakan pengurangan subsidi BBM.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara<sup>1</sup> : (i) memberikan kemudahan akses kepada masyarakat di perdesaan, (ii) mengurangi pengeluaran masyarakat, (iii) meningkatkan peran serta masyarakat, dan (iv) meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan di desa tertinggal yang meliputi: (i) infrastruktur dan sarana yang mendukung aksesibilitas serta mengurangi keterisolasian, yaitu jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu, perahu, dan titian, (ii) infrastruktur yang mendukung kegiatan peningkatan produksi pangan, yaitu irigasi desa, dan (iii) infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, yaitu penyediaan air bersih desa. Sasaran dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan ini adalah : (i) tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, handal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, (ii) meningkatnya kemampuan masyarakat perdesaan dalam

---

<sup>1</sup> Seperti yang disebutkan dalam dokumen Departemen Pekerjaan Umum: *Pedoman Umum, Tahun 2005*

penyelenggaraan infrastruktur perdesaan, (iii) meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat perdesaan, (iv) meningkatnya kemampuan aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di perdesaan, dan (v) mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

PKPS BBM-IP dimulai bulan Agustus 2005 dan sampai sekarang masih berlangsung. Total anggaran program pada tahun 2005 adalah Rp. 3,342 milyar (setara USD 334 juta). Sampai bulan Oktober 2005, pelaksanaan program mencakup 33 Provinsi, 427 Kabupaten (tidak termasuk area akibat Tsunami dan DKI Jakarta) dan 12.834 desa. Saat ini sedang dilakukan diskusi untuk meningkatkan cakupan untuk pelaksanaan program tahun 2006-2007. Karena cakupan program dan tingkat kepentingan dalam kemungkinan besar menanggulangi dampak dari peningkatan harga BBM terhadap masyarakat miskin, penting untuk segera dilakukan evaluasi secara sistematis keefektifan dan manfaat program PKPS BBM-IP sebagai masukan untuk pelaksanaan program pada tahap selanjutnya.

## 1.2. Tujuan Studi

Tujuan studi evaluasi ini adalah mengetahui kemanfaatan dan keefektifan program PKPS BBM-IP yang meliputi :

- Pelaksanaan program secara keseluruhan:
  - Apakah program berjalan sesuai dengan mekanisme/prosedur dan tujuannya?
  - Apakah musyawarah desa berjalan sesuai dengan yang direncanakan?
  - Bagaimana proyek dipilih?
  - Apa saja masalah yang ditemui selama pelaksanaan program?
  - Bagaimana supervisi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dan seberapa sering dilakukan?
- Sasaran/ seleksi lokasi target :
  - Bagaimana 12.834 desa dipilih?, apakah sesuai dengan kriteria kemiskinan?
  - Di mana lokasi proyek?, dan apakah proyek tersebut juga bermanfaat bagi orang miskin?
- Hasil/output di lapangan :
  - Jenis kegiatan apa saja yang didanai dari Rp. 250 juta per desa?
  - Bagaimana kualitas hasil infrastruktur?
  - Apakah sudah ada pengaturan O&M?
  - Apakah ada kontribusi swadaya masyarakat?



- Dampak jangka pendek yang menyangkut :
  - Peningkatan akses
  - Ketenagakerjaan
  - Peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan pelaku dari pemerintah
- Aliran/penyimpangan penggunaan dana dan efektifitas dalam pembiayaan proyek :
  - Apakah dana Rp. 250 juta digunakan sebagaimana mestinya?
  - Apakah desa menerima total 250 juta/desa?, jika tidak, berapa jumlah sebenarnya yang diterima desa?, bagaimana waktu pencairan dana?
  - Apakah dana tersebut digunakan secara efektif (value for money)?
- Tata laksana program :
  - Transparansi informasi
  - Pengaduan
  - Tingkat kepuasan stakeholder.

### **1.3. Metodologi Studi**

#### **1.3.1. Lokasi Studi**

Program PKPS BBM-IP tahun 2005 anggarannya sebesar Rp. 3,342 milyar (setara USD 334 juta), mencakup 33 Provinsi, 427 Kabupaten, dan 12.834 desa. Lokasi studi terdiri dari 100 desa sasaran penerima program, yang berada di 21 kabupaten, dalam wilayah 7 Provinsi. Pemilihan lokasi sampel dilakukan dengan teknik multi stage sampling dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- i. 7 (tujuh) Provinsi dipilih dengan kriteria Provinsi tersebut merupakan wilayah pulau besar dan gugusan kepulauan. Ketujuh Provinsi tersebut adalah: Sumatera Utara dan Lampung mewakili Pulau Sumatera, Jawa Tengah dan Jawa Timur mewakili Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan mewakili Indonesia bagian timur serta Kalimantan Barat mewakili Pulau Kalimantan.
- ii. Di setiap Provinsi dipilih 3 (tiga) Kabupaten dengan kriteria:
  - Satu kabupaten ditetapkan oleh SATKER Pusat (Dep PU) dengan kriteria kabupaten termiskin di Provinsi yang bersangkutan.
  - Dua kabupaten lainnya dipilih oleh Konsultan/LP3ES dengan kriteria yang sama dengan kabupaten yang dipilih Dep. PU.Tiga kabupaten tersebut diharapkan berada pada lokasi yang tidak berjauhan.

- iii. Di setiap kabupaten dipilih 2-3 kecamatan secara random.
- iv. Di setiap kecamatan dipilih 2-3 desa secara random.

Pelaksanaan studi untuk tahap kedua ada beberapa perubahan lokasi yaitu:

1. Provinsi Bangka Belitung diganti dengan Provinsi Lampung karena prasarana yang dibangun belum 100%.
2. Kabupaten dan desa di Jawa Timur diganti karena adanya banjir bandang (*force majeure*) untuk Kabupaten Trenggalek diganti dengan Kabupaten Magetan.
3. Di Provinsi Sulawesi Selatan, ada 2 desa di Kabupaten Jeneponto yang diganti dari jadwal semula yaitu Desa Allu Tarroang dan Desa Bento Ujung Kecamatan Batang diganti dengan Desa Bungeng dan Desa Balang Loeterowang. Karena desa semula prasarananya belum mencapai 100%.

*Gambar dan nama-nama desa lokasi studi dapat dilihat pada lampiran (Gambar 1 dan Tabel 1.1)*

### **1.3.2. Metode Pengumpulan Data**

#### **1.3.2.1. Data Sekunder**

Data sekunder yang dibutuhkan diperoleh dari penanggung jawab dan pelaksana program di tingkat Pusat, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Data-data yang dikumpulkan meliputi:

- a) Data dari Departemen Pekerjaan Umum berupa: Pedoman Pelaksanaan Program, Petunjuk Teknis masing-masing jenis infrastruktur yang dibangun, Buku Daftar Rincian alokasi dana dan desa sasaran serta dokumen lainnya.
- b) Data dari Kabupaten berupa: Daftar desa yang diusulkan masuk dalam PKPS BBM-IP dan kriteria pemilihan desa, dan lain-lain.
- c) Data dari Desa berupa: Dokumen Usulan Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya, Dokumen Rencana Teknis, Gambar Disain Teknis (Dokumen Perubahan Teknis, kalau ada), Laporan Akhir Pelaksanaan Program/data dokumen pertanggungjawaban dan lain-lain.

#### **1.3.2.2. Data Primer**

Pengumpulan data primer dilakukan oleh masing-masing tenaga ahli sesuai dengan spesialisasinya, dengan mengacu/berpatokan pada daftar pertanyaan evaluasi mulai dari tingkat Kabupaten dan desa.

- a) Tenaga ahli keuangan menggunakan kuesioner keuangan dan mewawancarai Bendahara Organisasi Pelaksana dan review keuangan proyek;
- b) Tenaga ahli Teknik menggunakan kuesioner teknik dan mewawancarai Tenaga Teknik Organisasi Pelaksana atau Kader Desa atau mantan pekerja yang memahami masalah teknik dan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau Ketua OMS. Apabila infrastruktur dibangun oleh kontraktor maka tenaga ahli teknik akan melakukan wawancara dengan OMS dan kontraktor yang bersangkutan dan review teknis prasarana yang telah dibangun.

Tim tenaga ahli teknik akan meninjau semua infrastruktur yang dibangun. Jika di desa ada lebih dari 2 infrastruktur yang dibangun, maka penilaian untuk mutu teknis akan dilakukan terhadap 2 jenis infrastruktur saja dengan kriteria pemilihan sebagai berikut:

- i. Jenis infrastruktur dengan alokasi anggaran terbesar.
  - ii. Jenis infrastruktur dengan jumlah pemanfaat terbesar.
- c) Tenaga ahli pengembangan masyarakat menggunakan kuesioner sosial dan akan melakukan:
    - i. Wawancara mendalam dengan Kepala Desa / Kader Desa dan Ketua OMS.
    - ii. Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat desa yang menerima manfaat (perwakilan perempuan, warga miskin), Kelompok Pemakai dan Pemelihara (KPP) dan tokoh masyarakat. (Lihat Tabel 1.2.).

Tabel 1.1

## LOKASI DESA SAMPEL RAPID EVALUASI PKPS BBM-IP

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1	JATENG	1. BANJAR NEGARA	1. Bawang	1. Watuurip 2. Majalengka
			2. Karangobar	1. Binangun 2. Jelegon
		2. SEMARANG	1. Getasan	1. Batul 2. Tolokan
			2. Beringin	1. Kalijambe 2. Kalikurmo
		3. PURBALINGGA	1. Merebet	1. Binangun 2. Merebet
			2. Kaligondang	1. Kalijajar 2. Pagerandong
		2	KALBAR	1. SAMBAS
2. Galing	1. Trigadu 2. Tempapan Kuala			
3. Teluk Kramat	1. Sei Kumpai			
2. LANDAK	1. Mempawah Hulu			1. Tapakng 2. Galar
	2. Ngabang			1. Dara Itam I 2. Mandor Kiru
3. BENGKAYANG	1. Bengkayang			1. Bani amas
	2. Sungai Betung			1. Karya Bhakti
	3. Seluas			1. Terabung
	4. Jagoi Babang			1. Kumba
3	SUMUT			1. PHAK PHAK BARAT
		2. Sitelu Tali Urang Jahe	1. Kaban Tengah 2. Tanjung Meriah	
		2. DAIRI	1. Sidikalang	1. Sitinjo
			2. Sumbul	1. Pegangan Julu II
			3. Berampu	1. Sambaliang
			4. Silahi Sabungan	1. Paropo
		3. DELI SERDANG	1. Pagar Merbau	1. Sidodadi Batu 8
			2. Galang	1. Jaharun A
			3. Pantai Labu	1. Kubah Sentang 2. Denai Lama

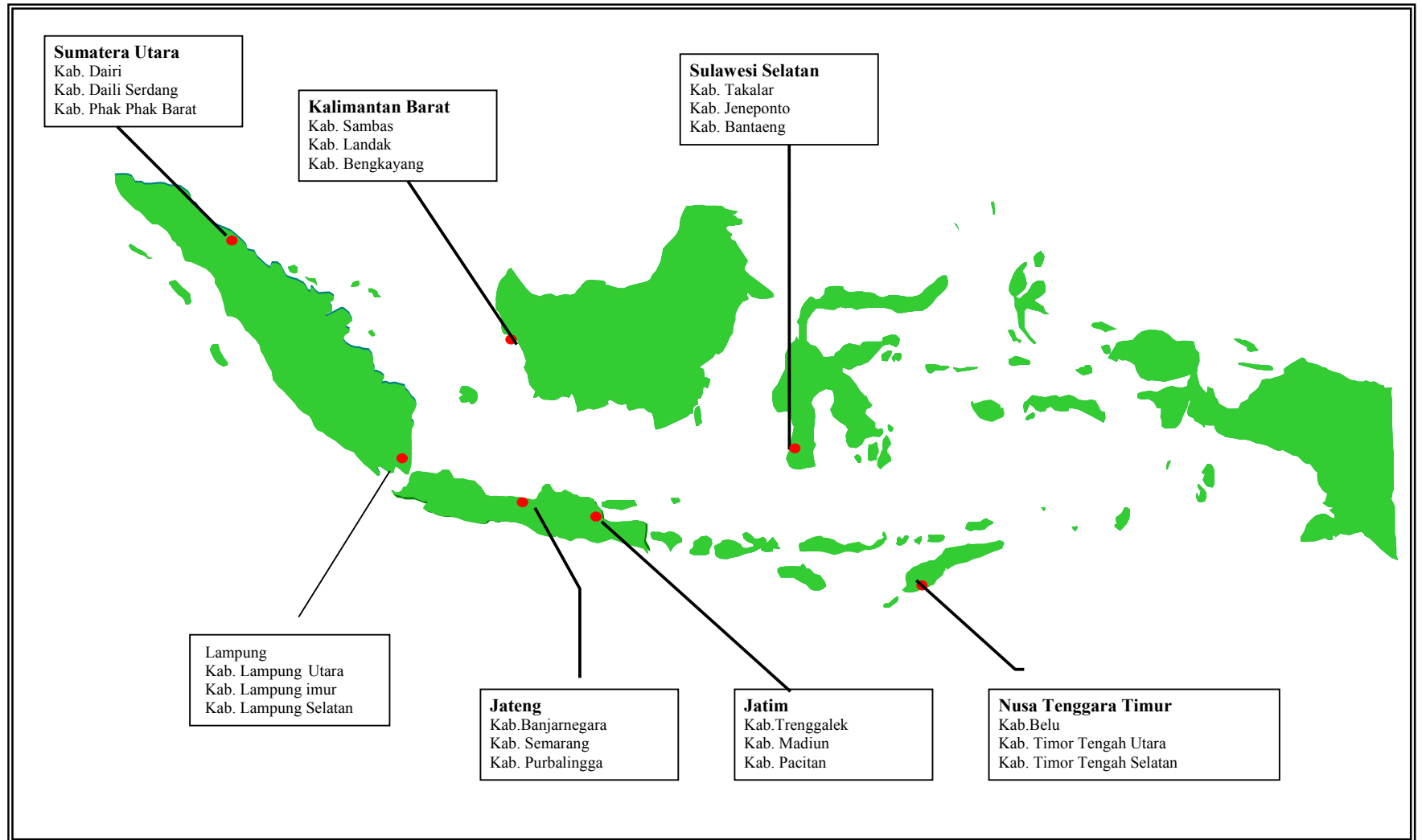
4	NTT	1. BELU	1. Tasifeto Timur	1. Silawan 2. Dafala
			2. Kakuluk Mesak	1. Jenilu 2. Kenibibi
		2. TIMOR TENGAH SELATAN	1. Nunkolo	1. Tulakan 2. Haumeni
			2. Polen	1. Laob 2. Loli
		3. TIMOR TENGAH UTARA	1. Biboki Utara	1. Makun 2. Hauteas
			2. Biboki Anleu	1. Sifaniha 2. Nonotbatan

## TRIP II

1	JATIM	1. MAGETAN	1. Bendo	1. Carikan 2. Bulak 3. Tanjung
			2. Karangrejo	1. Gebyog 2. Maron 3. Sambirembe
		2. MADIUN	1. Geger	1. Nglandung 2. Jatisari 3. Banaran
			2. Pilangkenceng	1. Luworo 2. Ngale 3. Sumbergandu
		3. PACITAN	1. Tulakan	1. Tulakan 2. Kluwih 3. Kalikuning
			2. Donorejo	1. Cemeng 2. Klepu 3. Sendang
2	SULSEL	1. TAKALAR	1. Mappakasunggu	1. Sanrobone 2. Patani
			2. Polobangkang Utara	1. Mattompodalle 2. Parang Luara 3. Pa'Rappunganta
		2. JENEPONTO.	1. Batang	1. Balangloetarawang 2. Bungeng 3. Tarawang
			2. Bontoramba	1. Balumbungan 2. Lentu 3. Bulu Sibatang
		3. BANTAENG.	1. Bissapu	1. Bontosunggu 2. Bontocinde 3. Bontorita
			2. Tompobulu	1. Balumbung 2. Bonto-Bontoa 3. Ereng-Ereng

3	LAMPUNG	1. LAMPUNG SELATAN	1. Kedondong	1. Padang Cermin 2. Panengahan 3. Sukajaya
			2. Rajabasa	1. Cugung 2. Kerinjing
		2. LAMPUNG TIMUR.	1. Sekampung	1. Giri Kelopo Mulyo 2. Sidomukti 3. Trimulyo
			2. Sukadana	1. Sukadana Darat 2. Sukadana Ilir 3. Sukadana Pasar
		3. LAMPUNG UTARA	1. Abung Tengah	1. Ogan Jaya 2. Ogan Campang 3. Kinciran
			2. Kotabumi Selatan	1. Taman Jaya 2. Jerangkang 3. Way Melan

Gambar 1. : Peta Lokasi Studi Penelitian



**Tabel 1.2**  
**DATA DAN SUMBER INFORMASI**

No	Data yang dikumpulkan	Sumber Informasi	Penanggungjawab
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Umum dan Pelaksanaan, Pedoman teknis PKPS BBM IP</li> <li>• Pengumpulan Data lokasi desa di 7 Provinsi</li> </ul>	Departemen Pekerjaan Umum	Tim Studi
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria dan daftar desa yang diusulkan ke tingkat pusat.</li> <li>• Jumlah desa</li> <li>• Penanganan pengaduan masyarakat.</li> <li>• Menilai tingkat kepuasan Kabupaten</li> <li>• Opini terhadap program dari sisi manajerial dan prosedur pelaksanaan program.</li> <li>• Harga Satuan Pemda</li> <li>• Dokumen perencanaan, Dokumen pelaksanaan (lihat lampiran Ceklist dokumen bagian keuangan), dan Dokumen Laporan Akhir.</li> </ul>	Bappeda Kab atau Satker Kab di Dinas PU	Tim Studi, terutama Ahli Sosial
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan dokumen proyek dari berbagai laporan antara lain: kemajuan proyek, data teknik, data keuangan, data partisipasi, kualitas infrastruktur, jumlah tenaga kerja.</li> <li>• Pengaduan Masyarakat</li> <li>• Pelestarian dan pemeliharaan kegiatan.</li> <li>• Tinjauan langsung ke lokasi infrastruktur.</li> <li>• Data administrasi desa dan sosial ekonomi penduduk</li> </ul>	Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa</li> <li>• OMS/Kader Desa</li> <li>• Masyarakat penerima pemanfaat</li> </ul>	Dilaksanakan oleh : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga ahli Sosial/ Pengembangan masyarakat melakukan interview kepada Ketua dan sekretaris OMS dan melakukan FGD dengan penerima manfaat, tokoh masyarakat,</li> <li>• Tenaga ahli keuangan melakukan interview dengan Bendahara OMS, review pembukuan</li> <li>• Tenaga ahli Teknik melakukan interview dengan Pengelola Teknik OMS dan meninjau lokasi proyek serta menilai kualitas infrastruktur, review aspek teknis</li> </ul>



### 1.3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Tenaga ahli keuangan menggunakan alat/instrument:

- **Kuesioner**

Teknik kuesioner keuangan ini ditujukan kepada bendahara OMS.

- **In-depth interview**

Wawancara dilakukan terhadap Bendahara OMS. Alat panduan wawancara yang digunakan adalah daftar pertanyaan terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya.

- **Melakukan review dan pemeriksaan keuangan proyek**

Kegiatan yang dilakukan meliputi: melihat rekening OMS, system pembukuan, dan dokumen bukti penggunaan/pengeluaran dana, membandingkan dokumen RAB dengan realisasi penggunaan dana.

- **Dokumentasi**

Merupakan kegiatan pengumpulan data sekunder, hal ini dilakukan dengan jalan:

- 1) Mengumpulkan dokumen administrasi PKPS BBM IP seperti Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Buku Rekening Bank, Buku Kas Umum, Laporan Penggunaan Dana, Catatan harian Penggunaan Material, Daftar Hadir Pekerja Harian, Penerimaan Insentif, Rekapitulasi Mingguan Kemajuan Pelaksanaan, Rekapitulasi Bulanan Kemajuan Pelaksanaan, serta Realisasi Kegiatan dan Biaya.
- 2) Bukti penggunaan dana berupa nota pembelian barang dan kuitansi.

b) Tenaga ahli Teknik menggunakan alat/instrument:

- **Kuesioner**

Kuesioner teknik ini ditujukan kepada sasaran penelitian yang terpilih (target group maupun pelaksana program).

- **Kelompok diskusi fokus (Focus Group Discussion)**

- **Melakukan review dan pemeriksaan teknik proyek**

Kegiatan yang dilakukan meliputi: evaluasi desain teknis dibandingkan dengan tinjauan lapangan, dan membandingkan dokumen RAB dengan harga satuan setempat.

- **In-depth interview**

Wawancara dilakukan terhadap Tenaga Teknik Organisasi Pelaksana atau Kader Desa atau mantan pekerja yang memahami masalah teknik dan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau Ketua OMS. Alat panduan wawancara yang digunakan adalah daftar pertanyaan terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya.

- **Dokumentasi**

Merupakan kegiatan pengumpulan data sekunder, hal ini dilakukan dengan jalan:

- 1) Mengumpulkan dokumentasi berupa Rencana Anggaran Dan Biaya, Desain prasarana dan Realisasi Kegiatan dan Biaya.
- 2) Tim tenaga ahli teknik meninjau lokasi dan memfoto infrastruktur yang dibangun.

c) Tenaga ahli sosial/pengembangan masyarakat menggunakan alat/intrument:

- **Kuesioner**

Teknik kuesioner sosial ini ditujukan kepada sasaran penelitian yang terpilih (target group maupun pelaksana program). Kuesioner dipergunakan untuk memperoleh data tentang kecenderungan-kecenderungan perilaku tertentu yang berkaitan dengan dampak program maupun pelaksanaannya.

- **Kelompok diskusi fokus (Focus Group Discussion),**

Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat desa yang menerima manfaat (perwakilan perempuan, warga miskin), masyarakat desa yang mendapatkan upah pada saat menjadi pekerja proyek, masyarakat desa yang menerima manfaat proyek, Kelompok Pemakai dan Pemelihara (KPP) dan tokoh masyarakat. Metode Kelompok Diskusi Fokus digunakan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek, dimana metode ini menunjukkan dua kelebihan utama:

- 1) *Penghematan waktu* – melakukan wawancara dengan sekelompok yang dipilih khusus karena memiliki informasi yang benar-benar dibutuhkan untuk analisis, maka penghematan waktu cukup berarti jika dibandingkan dengan wawancara terpisah dengan banyak orang.
- 2) *Ingatan komunal* – jika sekelompok orang diwawancarai tentang hal yang menyangkut suatu kegiatan yang cukup beraneka ragam dan dilaksanakan dengan berbagai kelompok, maka responden dapat dikumpulkan untuk memanfaatkan gabungan pengalaman dan informasi masing-masing, yaitu ingatan komunal (*"collective memory"*). Diharapkan muncul suatu sinergi antar mereka karena saling

mengingatkan, melengkapi, koreksi dan mendukung sehingga bisa menghasilkan sebuah konsensus tentang keadaan yang dialami bersama.

Metode ini sangat cocok dan cukup peka terhadap informasi yang dibutuhkan. Apabila setiap orang yang diwawancarai sering terjadi perbedaan persepsi dan fakta, bahkan bisa sama sekali salah maka perbedaan dan fakta tersebut harus di cek ulang dengan pihak lain. Metode ini memiliki satu kelemahan, jika ada satu atau dua orang yang sangat dominan atau agresif maka bisa meredam semangat orang lain untuk berpartisipasi. Dalam keadaan ini peran fasilitator menjadi sangat penting untuk membuat suasana yang ramah, mendukung dan memberikan kesempatan untuk semua orang berpartisipasi.

- **In-depth interview**

Kegiatan wawancara dengan responden terpilih dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam menganalisis manfaat (benefit) proyek terhadap masyarakat sekitar. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Satker Provinsi, Satker Kabupaten, Kepala Desa/Kader Desa dan Ketua OMS, Alat panduan wawancara yang digunakan adalah daftar pertanyaan terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya.

- **Dokumentasi**

Merupakan kegiatan pengumpulan data sekunder, hal ini dilakukan dengan jalan:

- 1) Mengumpulkan literatur/pustaka yang berkaitan dengan pemberdayaan, baik dalam bentuk *teksbooks*, hasil-hasil penelitian yang relevan, panduan umum dan operasional program PKPS BBM IP pada khususnya, serta panduan umum dan operasional program pemberdayaan masyarakat pada umumnya.
- 2) Melakukan pembahasan terhadap hasil pengumpulan literatur/pustaka yang berkaitan dengan program-program pemberdayaan masyarakat tersebut.

Memformulasikan berbagai persoalan pokok yang timbul dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ke dalam instrumen penelitian yang lebih spesifik.

#### 1.4. Teknik Analisis Data

Ada 3 (tiga) aspek kajian yang akan dianalisis dalam studi ini, yaitu aspek infrastruktur, keuangan dan sosial. Dari 3 (tiga) aspek tersebut meliputi:

- Aspek Infrastruktur, terdiri dari; Kualitas, fungsi dan kemanfaatan, hasil dilapangan serta efektifitas pembiayaan/penghematan.
- Aspek Keuangan, terdiri dari; penyaluran dana dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

- Aspek Sosial, terdiri dari; pelibatan masyarakat, transparansi, penanganan pengaduan, dampak jangka pendek, penguatan kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah, serta tingkat kepuasan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam analisis, adalah analisis deskriptif-kualitatif, analisis kualitas/mutu infrastruktur dan efektivitas biaya.

Pemeriksaan kualitas fisik pekerjaan digunakan untuk melihat mutu infrastruktur yang dibangun berdasarkan standart teknik pada program pemberdayaan. Sebelum melakukan pemeriksaan kualitas infrastruktur dilapangan, tenaga ahli teknik harus sudah mempelajari dan berdiskusi dengan Tenaga Teknik Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mengenai dokumen rencana teknik dan gambar disain teknik ataupun perubahannya yang sudah disusun sebelumnya.

Untuk menilai indikator pemeriksaan digunakan kriteria : “Cukup”, “Agak Kurang”, “Kurang” dan “Tidak Relevan”. Penilai harus memilih salah satu dari 4 (empat) kategori penilaian dan beri tanda “√” untuk jawaban yang sesuai dengan yang ada dilapangan, yaitu :

-	Cukup (C)	:	Jika kualitas infrastruktur yang dibangun telah memenuhi segala syarat dan gambar disain teknis yang ada dalam dokumen ataupun perubahannya.
-	Agak Kurang (AK)	:	Jika terdapat kesalahan atau kekurangan kecil yang masih harus diperbaiki agar memenuhi segala syarat dan gambar disain teknis yang ada dalam dokumen teknis ataupun perubahannya.
-	Kurang (K)	:	Jika masih banyak kesalahan atau kekurangan yang masih harus diperbaiki agar memenuhi segala syarat dan gambar disain teknis yang ada dalam dokumen teknis ataupun perubahannya.
-	Tidak Relevan (TR)	:	Jika ada item yang ternyata tidak ada di lapangan maupun dalam desain RAB, namun terdapat dalam ceklis.

Dalam ceklis, tiap item yang dinilai ‘*cukup*’ diberi skor 1 (satu) point, untuk yang dinilai ‘*agak kurang*’ diberi skor minus 1 (satu) point, dan untuk yang dinilai ‘*kurang*’ diberi skor minus 5 (lima) point. Sedangkan item yang ternyata tidak ada di lapangan maupun dalam desain RAB, namun terdapat dalam ceklis, dimasukkan ke dalam kolom ‘*tidak relevan*’, dan kategori ini tidak dimasukkan dalam item penilaian.

Skor merupakan perbandingan total dari semua item yang diberi tanda (√) dibanding skor maksimal apabila semua item tersebut dinilai satu point. Skor adalah Persentase maksimal tersebut.

Untuk infrastruktur yang dinilai ‘*baik*’, skor harus di atas 60% maksimal. Untuk yang dinilai ‘*cukup*’ skor adalah antara 40% dan 60% maksimal. Skor yang dinilai ‘*jelek*’ adalah positif tetapi dibawah 40%.

## **1.5. Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Studi**

Proses pelaksanaan kegiatan studi meliputi tiga tahapan kegiatan, yaitu tahapan persiapan, kegiatan lapangan, dan penyusunan laporan (termasuk kompilasi dan analisis data).

### **1.5.1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan pelaksanaan studi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Persiapan umum dan konsolidasi tim studi**

Persiapan umum dan konsolidasi tim studi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan jadwal pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah: (i) Melakukan koordinasi dengan Tim Bappenas dan Tim Dep. PU mengenai substansi pekerjaan yang harus dilaksanakan, (ii) Memahami lebih mendalam mengenai substansi pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kerja (TOR), serta (iii) Menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan.

#### **b. Koordinasi awal dengan penanggungjawab Program PKPS BBM-IP**

Koordinasi awal dengan penanggungjawab Program PKPS BBM-IP dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang dibutuhkan bagi kelancaran pelaksanaan studi (diantaranya meliputi informasi mengenai konsep dasar program, komponen kegiatan program, hingga status kinerja pelaksanaan program di masing-masing lokasi desa kegiatan). Koordinasi dimaksudkan pula untuk mematangkan proses pemilihan lokasi sampel studi PKPS BBM-IP sekaligus menyusun daftar kontak masing-masing program di masing-masing lokasi terpilih. Koordinasi dengan penanggungjawab program dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan rapat koordinasi formal maupun informal.

#### **c. Penyusunan instrumen dan metodologi studi**

Penyusunan instrumen dan metode analisis ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan lingkup dan arahan pelaksanaan studi. Proses penyusunan instrumen dan metodologi studi ini meliputi perumusan variabel dan indikator kinerja PKPS BBM-IP, perumusan instrumen pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, serta metode pengambilan keputusan/kesimpulan atas kinerja yang dicapai. Hasil perumusan tersebut selanjutnya dibahas bersama dengan tim Bappenas, tim Bank Dunia serta penanggung jawab guna mendapatkan masukan penyempurnaan.

Guna mengidentifikasi kualitas hasil studi dengan menggunakan instrumen dan metode analisis yang telah disusun (sekaligus mengidentifikasi kemudahan dan permasalahan yang mungkin dihadapi dalam proses penggunaan instrumen dan metode analisis studi yang disusun), instrumen dan metode analisis tersebut akan diujicobakan di lapangan. Sesuai dengan kesepakatan, uji coba dilakukan di salah satu desa di Kabupaten Bogor sebelum tim studi berangkat ke lapangan.

Hasil proses ujicoba ini selanjutnya akan dibahas bersama dengan tim Bappenas serta penanggung jawab program, guna mendapatkan masukan penyempurnaan tahap akhir. Hasil penyempurnaan inilah yang akan digunakan sebagai dasar implementasi studi rapid assement PKPS BBM-IP.

### **1.5.2. Tahap Kegiatan Lapangan**

Kegiatan lapangan diawali dengan proses konsolidasi diantara personil tim konsultan maupun dengan tim konsultan di daerah berkaitan dengan pembahasan jadwal dan wilayah pelaksanaan survey. Bersamaan dengan kegiatan konsolidasi tersebut, dilakukan pula kegiatan penggandaan bahan/instrumen pengumpulan data, surat-surat ijin/keterangan yang diperlukan, dan alat-bahan lainnya.

#### **a. Kegiatan Survey Lapangan**

Pelaksanaan survey lapangan dalam rangka pengumpulan data Program PKPS BBM - IP akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan pelaksanaan kegiatan lapangan, yaitu:

1. Kegiatan Lapangan Tahap I, tanggal 19 February 2006 s/d 19 Maret 2006, yang dilakukan untuk pengumpulan data di 48 desa yang menjadi wilayah pelaksanaan program.
2. Kegiatan Lapangan Tahap II, bulan April 2006 s/d Mei 2006, yang dilakukan untuk pengumpulan data di 52 desa yang menjadi wilayah pelaksanaan program.

#### **b. Evaluasi Proses dan Hasil Kegiatan Lapangan**

Diantara setiap tahapan pelaksanaan survey lapangan tersebut, akan dilakukan proses evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan survey lapangan yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pengumpulan data yang dibutuhkan sekaligus mengidentifikasi berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan survey lapangan.

### **1.5.3. Tahap Kompilasi Data, Analisis, Dan Penyusunan Laporan**

Setelah data-data yang dibutuhkan diperoleh, selanjutnya dilakukan proses kompilasi data yang dilanjutkan dengan proses analisis dan penyusunan laporan kinerja dampak ekonomi dari Program PKPS BBM IP. Proses kompilasi, analisis, dan penyusunan laporan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan lapangan yang telah ditetapkan. Proses kompilasi, analisis, dan penyusunan laporan dilakukan pada akhir setiap tahapan kegiatan lapangan hingga menjelang proses pelaksanaan tahapan kegiatan lapangan berikutnya. Setelah seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan lapangan selesai dilakukan (akhir pelaksanaan tahapan kegiatan lapangan tahap ke-2), selanjutnya dilakukan analisis serta penyusunan laporan kegiatan studi secara komprehensif.

### **1.5.4. Supervisi Kegiatan Lapangan**

Sebagai bagian dari proses manajemen pengendalian terhadap pelaksanaan studi, Tim Bappenas dan Tim Bank Dunia akan melakukan kegiatan supervisi dalam proses pelaksanaan kegiatan studi di lapangan. Tujuan kegiatan supervisi ini untuk memastikan kelancaran kegiatan lapangan dan memberikan bantuan teknis terhadap anggota tim studi apabila mendapatkan beberapa hambatan yang perlu diatasi di tingkat Pemerintah Pusat.

### **1.6. Pelaporan**

Lembaga yang ditunjuk akan bertanggung jawab untuk memberikan laporan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dengan tahapan pelaporan sebagai berikut:

1. Laporan Tahap Pertama (bulan Februari sampai Maret 2006), mencakup 48 desa sampel.
2. Laporan keseluruhan hasil evaluasi (dua fase, dari bulan Maret sampai dengan Juni 2006), yang mencakup kurang lebih 100 desa.

Laporan tersebut akan diatur sebagai berikut:

- a. Ringkasan Eksekutif (maksimum 5 halaman)
- b. Pendahuluan dan Latar Belakang PKPS-BBM IP termasuk deskripsi singkat yang berisi gambaran besar proyek.
- c. Temuan-temuan utama yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan evaluasi dibawah ini harus dijelaskan dalam laporan :

PERTANYAAN STUDI	
1	<p><b>Seleksi Lokasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana 12, 834 desa dipilih ? Apakah sesuai dengan kriteria kemiskinan?</li> <li>▪ Dimana lokasi proyek, dan apakah proyek tersebut juga bermanfaat bagi orang miskin ?</li> </ul>
2	<p><b>Hasil di Lapangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis kegiatan apa saja yang didanai dari Rp. 250 juta per desa?</li> <li>▪ Bagaimana kualitas hasil infrastruktur?</li> <li>▪ Apakah sudah ada pengaturan O&amp;M?</li> <li>▪ Kontribusi swadaya masyarakat</li> </ul>
3	<p><b>Aliran/penyimpangan penggunaan dana dana &amp; Efektifitas Pembiayaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya</li> <li>▪ Apakah desa menerima total 250 juta/desa ? Jika tidak, berapa jumlah sebenarnya yang diterima desa? Waktu pencairan dana?</li> <li>▪ Apakah dana tersebut digunakan secara efektif (value for money)?</li> </ul>
4	<p><b>Dampak Jangka Pendek</b></p> <p>Apa dampak jangka pendek dari kegiatan ini yang menyangkut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ meningkatkan akses ke infrastruktur desa;</li> <li>▪ ketenagakerjaan; dan</li> <li>▪ peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan pelaku dari pemerintah</li> <li>▪ kepedulian masyarakat untuk memelihara infrastruktur yang dibangun</li> </ul>
5	<p><b>Isu Kepemerintahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transparansi Informasi – Apakah masyarakat mengetahui program ini? Apakah informasi program tersedia kepada Publik? Apakah masyarakat tahu bagaimana kegiatan dipilih di desanya? Apakah pertemuan masyarakat benar-benar dilaksanakan?</li> <li>▪ Pengaduan – Apakah mekanisme penanganan pengaduan sudah ada dan apakah masyarakat tahu harus kemana menyalurkan pengaduannya?</li> <li>▪ Tingkat kepuasan – Apakah stakeholder (PU, TK, aparat ditingkat daerah, masyarakat pemanfaat) puas dengan pelaksanaan program? Apa pendapat mereka terhadap program?</li> </ul>
6	<p><b>Pelaksanaan Program Secara Keseluruhan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah program berjalan sesuai dengan yang seharusnya? Apakah program berjalan sesuai dengan prosedur dan tujuannya ?</li> <li>▪ Apakah musyawarah desa berjalan sesuai dengan yang direncanakan ?</li> <li>▪ Bagaimana proyek dipilih?</li> <li>▪ Apa saja masalah yang ditemui selama pelaksanaan program?</li> <li>▪ Bagaimana supervisi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dan seberapa sering dilakukan?</li> </ul>

- d. Laporan singkat tiap Provinsi, yang mana masing-masing Provinsi terdiri dari dua halaman tentang pelaksanaan PKPS BBM-IP.
- e. Rekomendasi untuk perbaikan program dalam tahapan selanjutnya.
- f. Kesimpulan.



Laporan ini harus ringkas dan langsung ke topik pembahasan. Dalam laporan dan presentasinya, Lembaga yang ditunjuk harus menjawab semua pertanyaan survey seperti yang telah dijabarkan dalam daftar di atas.

Lembaga yang ditunjuk juga akan membuat dua presentasi dalam powerpoint yang ditujukan bagi Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia mengenai temuan-temuan dari fase pertama dan laporan akhir.

Selain laporan akhir tersebut diatas, akan dilampirkan juga profil desa yang disurvey, yang berisikan informasi pelaksanaan program di desa yang dianalisa.

## **BAB - 2**

### **GAMBARAN UMUM PROGRAM PKPS BBM-IP**

#### **2.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara dengan sumber daya alam yang sangat besar. Posisi geografis yang sangat strategis, iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun, serta hutan dan kandungan bumi yang sangat kaya, merupakan modal utama untuk kemakmuran rakyatnya. Akan tetapi, hingga saat ini potensi besar itu belum secara nyata memberikan kemakmuran bagi rakyatnya.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak, yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Pada gilirannya, kondisi tersebut mengakibatkan antara lain : (i) tingginya beban sosial ekonomi masyarakat, (ii) rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, (iii) rendahnya partisipasi aktif masyarakat, (iv) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan (v) kemungkinan pada merosotnya mutu generasi yang akan datang.

#### **2.2. Maksud**

Program PKPS BBM IP dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat miskin di perdesaan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan transportasi, air minum, dan irigasi serta untuk daerah tertentu yang belum ada listrik, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya perdesaan semakin tumbuh dan berkembang.

#### **2.3. Tujuan**

Program PKPS BBM IP bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara:

1. Memberikan kemudahan akses kepada masyarakat di perdesaan.
2. Mengurangi pengeluaran masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.

## 2.4. Sasaran

Sasaran lokasi peningkatan infrastruktur di perdesaan berada di 12.834 desa tertinggal sesuai dengan ketertinggalan infrastruktur.

Sasaran dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan ini adalah:

1. Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatnya kemampuan masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur perdesaan.
3. Meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat perdesaan.
4. Meningkatnya kemampuan aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di perdesaan.
5. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

## 2.5. Ruang Lingkup

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan di desa tertinggal yang meliputi:

1. Infrastruktur dan sarana yang mendukung aksesibilitas serta mengurangi keterisolasian, yaitu; jalan desa, jembatan, tambatan perahu, perahu dan titian.
2. Infrastruktur yang mendukung kegiatan peningkatan produksi pangan yaitu irigasi.
3. Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, yaitu penyediaan air bersih, sanitasi dan di beberapa daerah tertentu yang memerlukan listrik.

Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk satu infrastruktur atau lebih serta dapat dilaksanakan secara terpadu untuk beberapa desa.

## 2.6. Prinsip dan Pendekatan

### 2.6.1. Prinsip

Prinsip-prinsip penyelenggaraan PKPS BBM –IP adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat (*acceptable*). Hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan solusi teknis, penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan, maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan infrastruktur perdesaan terbangun.
2. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan.
4. Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur dan sarana perdesaan yang mandiri oleh masyarakat.

### 2.6.2. Pendekatan

Program PKPS-BBM IP merupakan program pembangunan yang berkualitas dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui:

1. Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan;
2. Keberpihakan kepada yang miskin, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil ditujukan kepada penduduk miskin;
3. Otonomi dan desentralisasi, artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya;
4. Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan;
5. Keswadayaan, artinya masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam kegiatan, penyerahan lahan dengan tanpa ganti rugi dan lain sebagainya;
6. Keterpaduan pembangunan, artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.

### 2.7. Mekanisme Penentuan Sasaran (Pemilihan Lokasi dan Jenis Infrastruktur)

1. Tim Koordinasi Pusat menyiapkan program yang berisikan kriteria sasaran, jumlah desa/kelurahan sasaran dan daftar nama desa/kelurahan sasaran sesuai tingkat ketertinggalannya per kabupaten/kota.
2. Tim Koordinasi Pusat (TKP) menyampaikan program tersebut kepada Tim Koordinasi Provinsi (TKPr) dan Tim Koordinasi Kabupaten (TKK).
3. TKK menyampaikan program dan nama desa sasaran PKPS BBM IP kepada Kecamatan dan desa-desa/kelurahan-kelurahan terpilih melalui sosialisasi dan musyawarah desa 1.
4. Tim Kecamatan dan Satuan Kerja (Satker) Kabupaten/Kota bertugas sebagai pembina program infrastruktur perdesaan di wilayah kerjanya, termasuk mensosialisasikan dan

memfasilitasi penyelenggaraan forum pertemuan musyawarah desa dalam rangka menentukan dan mengidentifikasi permasalahan infrastruktur perdesaan dan infrastruktur yang ada di tingkat desa.

5. Satker Kabupaten/kota dan tim kecamatan bertugas untuk membentuk organisasi masyarakat setempat (OMS)/POKMAS/LPD dan menyelenggarakan musyawarah desa di tingkat desa sebagai forum pertemuan para aparat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan dari penduduk/keluarga miskin dalam menentukan berbagai permasalahan infrastruktur didesanya. Serta membantu kelancaran proses persiapan usulan kegiatan sebagai tindak lanjut dari musyawarah desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan.

## **2.8. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana**

Penyaluran dan pencairan dana PKPS BBM –IP dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Dana PKPS BBM IP untuk masing-masing Provinsi/kabupaten/kota disalurkan melalui dokumen anggaran/DIPA kepada Satker Sementara PKPS BBM IP di Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Penerima dana untuk pembangunan infrastruktur dan sarana adalah masyarakat desa melalui OMS/POKMAS/LKD yang bersangkutan yang disalurkan ke rekening masing-masing OMS/POKMAS/LKD dan atau kepada pihak ketiga.
3. Secara khusus untuk OMS/POKMAS/LKD dan bendahara diwajibkan membuka rekening atas nama rekening PKPS BBM IP dan memberitahukan nomor rekening kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Satker Sementara PKPS BBM IP Kabupaten/Kota.
4. Kuasa Pengguna Anggaran dari masing-masing Satker menyampaikan nama dan specimen tanda tangan dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji Pembebanan dan penandatanganan SPM Bendahara, serta cap dinas instansi penerbit SPM kepada KPPN setempat untuk dipergunakan sebagai penguji.
5. Kontrak kerja ditandatangani oleh PK/satker sementara PKPS BBM IP Kabupaten/Kota dengan OMS/POKMAS/LKD atau pihak ketiga.

Pengajuan pencairan dana oleh OMS/POKMAS/LKD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap I: sebesar 40% dari nilai kontrak dengan melampirkan kontrak kerja, rencana pengguna dana dan kuitansi penagihan.
2. Tahap II : sebesar 40% dari nilai kontrak dibayarkan pada saat progres pelaksanaan

kegiatan sudah mencapai min 36%, berdasarkan laporan progres yang sudah dinilai dan disetujui oleh PK yang dilampirkan kontrak kerja, progres fisik dan keuangan, rancana penggunaan dana tahap 2 dan kuitansi tagihan tahap 2.

3. Tahap III: sebesar 20% dari nilai kontrak dibayarkan pada saat progres pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 72% berdasarkan laporan progress yang sudah dinilai dan disetujui oleh PK dengan melampirkan:
  - a. Kontrak kerja.
  - b. Progres fisik dan keuangan.
  - c. Rencana Pengguna dana tahap III.
  - d. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP).
  - e. Kuitansi tagihan tahap III
  - f. Pengajuan dana untuk pihak ketiga dan bendahara pengeluaran, mengacu pada peraturan Dirjend Perbendaharaan Departemen Keuangan no. 02/PB/2005 tgl 9 Mei 2005.
  - g. PK mengajukan SPP oleh OMS/POKMAS/LKD dengan dilampiri oleh kontrak kerja, kuitansi tagihan/tanda terima bermaterai, rencana penggunaan dana serta laporan progress (khusus untuk tahap II dan III) kepada penguji pembebanan/Penerbit SPM untuk diproses penerbitan SPM nya.
  - h. Kuasa Pengguna Anggaran Satker PKPS BBM IP kabupaten/Kota menyampaikan surat perintah membayar (SPM) dengan dilampiri dokumen pendukung berupa kontrak kerja dan kuitansi tagihan kepada KPPN.
  - i. Apabila dana masih mencukupi, KPPN menerbitkan SP2D kepada lembaga keuangan setempat sesuai dengan nomer rekening OMS/POKMAS/LKD atau pihak ketiga.
  - j. Khusus untuk OMS/POKMAS/LKD, proses pencairan dana ditandatangani oleh minimal 2 orang yaitu Ketua OMS/POKMAS/LKD dan Bendahara OMS/POKMAS/LKD.
  - k. Tata cara penyaluran dan penerimaan dana PKPS BBM IP ini, secara khusus akan diatur dalam Surat Edaran Dirjend Perbendaharaan Departemen Keuangan.

## BAB – 3

### HASIL STUDI

Pada bagian ini dipaparkan hasil temuan studi yang merupakan hasil dari pengamatan visual lapangan, penggalian dokumen dan data sekunder, maupun wawancara baik secara individual dengan *key person* maupun *focus group discussion (FGD)*. Tokoh kunci yang dijadikan narasumber disesuaikan dengan materi yang digali, yaitu pengurus OMS untuk manajemen dan kinerja pelaksanaan pembangunan, dan bendahara OMS untuk penggalian data keuangan. Selain di tingkat desa, juga dilakukan penggalian data dari berbagai narasumber lain khususnya dari pihak Satker Kabupaten, yang terbukti dalam penelitian ini memiliki peranan cukup besar dalam kinerja program secara keseluruhan. Diskusi secara kelompok (FGD) terhadap masyarakat merupakan upaya untuk melakukan penyeimbangan informasi, atau sebagai bentuk *check and balance* informasi yang diperoleh dari OMS sebagai pelaksana kegiatan.

Narasi pada bagian ini akan disusun menurut kaidah “kronologis”, mulai dari bagaimana penetapan lokasi program, pelaksanaan dan permasalahan, hasil dan dampak pembangunan, serta diakhiri dengan analisa yang agak menyeluruh terhadap pelaksanaan program secara keseluruhan menyangkut mulai dari administrasi sampai dengan proses demokrasi dan partisipasi dalam pelaksanaan. Hal ini penting dikemukakan, karena program PKPS-BBM IP merupakan program yang berupaya melibatkan masyarakat secara optimal dalam seluruh proses pelaksanaannya. Namun demikian, sebelum membicarakan secara detail proses pelaksanaan program, dipaparkan kondisi umum pelaksanaan program sebagai latar penjas untuk narasi selanjutnya.

Narasi disampaikan dengan mengutamakan kondisi yang umum dijumpai, lalu diikuti dengan perbandingan kondisi spesifik antar lokasi Provinsi maupun antar jenis prasarana yang dibangun. Dalam beberapa hal, juga disampaikan temuan-temuan di desa sampel, khususnya bagi kasus-kasus yang spesifik untuk diangkat.

#### **3.1. Gambaran Umum Kemajuan Pelaksanaan Program**

Dari keseluruhan sampel, yaitu 100 desa yang berada di 21 kabupaten dan 7 Provinsi; terlihat bahwa penyerapan dana dari yang disediakan sebesar Rp. 250 juta per desa telah mencapai 95% (tabel 3.1.). Terdapat tiga Provinsi yang pencapaian penyerapan dananya sudah 100% di seluruh desa sampel, yaitu di Jatim, Sulsel, dan Lampung. Sedangkan sisanya belum, kecuali Jateng hanya 1 desa yang belum menyerap 100% dana yang disediakan. Penyerapan

dana terendah secara rata-rata ditemukan di NTT, yaitu rata-rata baru menyerap 53,33%. Hal ini berdasarkan atas waktu pelaksanaan penelitian yang terdiri dari 2 tahap yaitu tahap 1 dimulai pada bulan Februari-Maret 2006 untuk Provinsi Sumut, Jateng, Kalbar dan NTT; dan tahap 2 dimulai bulan April-Mei 2006 untuk Provinsi Jatim, Sulsel dan Lampung.

Penyerapan dana tidak berhubungan linier secara langsung dengan pencapaian pekerjaan infrastruktur yang dibangun. Dari tabel 3.2. terlihat, bahwa sampai dengan saat penelitian dilakukan, kemajuan pembangunan fisik yang sudah 100% di seluruh desa sampel di provinsi bersangkutan, hanya ditemukan di Provinsi Jatim, Sulsel, dan Lampung. Satu hal yang menarik, di Sumatera Utara kemajuan fisik sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan dana, yaitu 80% berbanding 85,81%. Hal ini dimungkinkan, karena pihak mitra yang mengerjakan pekerjaan menggunakan dananya sendiri, agar pekerjaan tidak terlambat. Tingkat kemajuan fisik paling rendah ditemukan di NTT, dimana rata-rata baru mencapai 39,08% dengan selang antara 0–85%. Keempat desa sampel di Kabupaten TTU belum memulai pekerjaan sama sekali sampai saat studi dilakukan, yaitu pertengahan Februari sampai pertengahan Maret 2006.

Dari sisi jumlah desa, telah 76 desa yang telah menyelesaikan pekerjaan fisik sampai selesai (100%). Dibandingkan dengan penyerapan anggaran, hanya 70 desa yang telah menyerap dana 100%. Sementara, jika dilihat rata-rata dari seluruh desa sampel (100 desa), maka pekerjaan fisik telah sampai pada 89,37%, sedangkan penyerapan dana telah mencapai 88,12%. Data ini menunjukkan bahwa kemajuan fisik lebih tinggi sedikit dibandingkan kemajuan keuangan yang diserap.

Seluruh pekerjaan bangunan yang sudah selesai tersebut, seluruhnya telah diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember 2005. Khusus untuk desa-desa sampel di NTT, belum satupun desa yang sudah menyelesaikan pekerjaannya secara penuh, meskipun 4 desa di Kabupaten Belu telah menyerap 80% total dana yang disediakan atau sampai dengan termin kedua pencairan.



**Tabel 3.1**  
**Rekapitulasi desa berdasarkan kemajuan dan rata-rata**  
**Penyerapan dana per Provinsi lokasi penelitian**

Provinsi	Jumlah desa atas penyerapan dana (desa)				Jml desa sampel	Rata-rata penyerapan dana per desa (%)
	Sudah 100 %	%	Belum 100 %	%		
Sumut*	2	16.67	10	83.33	12	80.00
Jateng*	11	91.67	1	8.33	12	98.33
Kalimantan Barat*	5	41.67	7	58.33	12	68.33
NTT*	0	-	12	100.00	12	53.33
Jatim	18	100.00	0	-	18	100.00
Sulsel	17	100.00	0	-	17	100.00
Lampung	17	100.00	0	-	17	100.00
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>70.00</b>	<b>30</b>	<b>30.00</b>	<b>100</b>	<b>88,12</b>

Keterangan: \* = pencapaian per Februari 2006.

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi jumlah desa berdasarkan kemajuan pembangunan prasarana**  
**(Per Provinsi)**

Provinsi	Kemajuan Fisik (jumlah desa)						TOTAL	
	100%		≥ 50 %		≤ 50 %			
	JML	(%)	JML	(%)	JML	(%)	JML	(%)
Sumut*	8	66.67	3	25.00	1	8.33	12	100.00
Jateng*	11	91.67	1	8.33	0	-	12	100.00
Kalimantan Barat*	5	41.67	6	50.00	1	8.33	12	100.00
NTT*	0	-	6	50.00	6	50.00	12	100.00
Jatim	18	100.00	0	-	0	-	18	100.00
Sulsel	17	100.00	0	-	0	-	17	100.00
Lampung	17	100.00	0	-	0	-	17	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>76.00</b>	<b>16</b>	<b>16.00</b>	<b>8</b>	<b>8.00</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>

Keterangan: \* = pencapaian per Februari 2006

Selanjutnya pada Tabel 3.3. dan 3.4. secara berturut-turut dibawah ini diperlihatkan seluruh desa sampel penelitian yang telah menyelesaikan pekerjaan 100%, dilanjutkan dengan desa-desa yang penyelesaian pekerjaannya di bawah 100%. Dari ketujuh provinsi yang desa-desa sampelnya telah mencapai kemajuan fisik 100%, hanya di Sumatera Utara yang penyerapan dananya belum seluruhnya. Artinya, dana yang telah dikeluarkan dalam pembangunan sesungguhnya lebih besar dari dana yang diserap. Hal ini terutama ditemukan di Kabupaten Dairi, satu desa di Pak-pak dan satu desa lagi di Deli Serdang. Untuk menutupi

kebutuhan dana yang belum cair, pihak mitra OMS atau kontraktor telah mengeluarkan dananya sendiri untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.

Kondisi serupa juga terjadi di Kalbar, dimana dengan rata-rata penyerapan dana yang baru mencapai 68,33% telah dicapai kemajuan fisik sampai dengan 83,75%. Lebih majunya pekerjaan fisik dibandingkan dana yang diserap ditemukan pada 7 desa di Kalbar. Bahkan di Terabung (Kabupaten Bengkayang), meskipun belum ada penyerapan dana sama sekali (0%), namun pekerjaan fisik sudah dimulai.

**Tabel 3.3**  
**Persentase Penyerapan dana pada desa yang Pembangunan fisik**  
**Prasarananya sudah mencapai 100%**

No	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten	Persentase dana yg sdh diterima (%)
<b>Sumatera Utara</b>				
1	Sitinjo	Sidikalang	Dairi	80.00
2	Sambaliang	Sidikalang	Dairi	80.00
3	Pegagan Julu II	Sumbul	Dairi	80.00
4	Paropo	Sumbul	Dairi	80.00
5	Kecupak II	Salak	Pakpak	80.00
6	Kubah Sentang	Pantai Labu	Deli Serdang	80.00
7	Jaharun A	Pagar Merbau	Deli Serdang	100.00
8	Sidodadi	Galang	Deli Serdang	100.00
<b>Jawa Tengah</b>				
1	Kalikurmo	Bringin	Semarang	100.00
2	Kalijambe	Bringin	Semarang	100.00
3	Batur	Getasan	Semarang	100.00
4	Majalengka	Bawang	Banjarnegara	100.00
5	Watuurip	Bawang	Banjarnegara	100.00
6	Jlegong	Karangkoobar	Banjarnegara	100.00
7	Binangun	Karangkoobar	Banjarnegara	100.00
8	Kalikajar	Kalikondang	Purbalingga	100.00
9	Pagerandong	Kalikondang	Purbalingga	100.00
10	Mrebet	Mrebet	Purbalingga	100.00
11	Binangun	Mrebet	Purbalingga	100.00
<b>Kalimantan Barat</b>				
1	Kumba	Jagoibabang	Bengkayang	100.00
2	Sumber Harapan	Sambas	Sambas	100.00
3	Sei Kumpai	Teluk Kramat	Sambas	100.00
4	Tri Gadu	Galing	Sambas	100.00
5	Tempapan Kuala	Galing	Sambas	100.00
<b>Jawa Timur</b>				
1	Carikan	Bendo	Magetan	100.00
2	Bulak	Bendo	Magetan	100.00
3	Tanjung	Bendo	Magetan	100.00
4	Gebyog	Karangrejo	Magetan	100.00
5	Maron	Karangrejo	Magetan	100.00
6	Sambirembe	Karangrejo	Magetan	100.00
7	Nglandung	Geger	Madiun	100.00

No	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten	Persentase dana yg sdh diterima (%)
8	Jatisari	Geger	Madiun	100.00
9	Banaran	Geger	Madiun	100.00
10	Luworo	Pilangkenceng	Madiun	100.00
11	Ngale	Pilangkenceng	Madiun	100.00
12	Sumbergandu	Pilangkenceng	Madiun	100.00
13	Tulakan	Tulakan	Pacitan	100.00
14	Kluwih	Tulakan	Pacitan	100.00
15	Kalikuning	Tulakan	Pacitan	100.00
16	Cemeng	Donorojo	Pacitan	100.00
17	Klepu	Donorojo	Pacitan	100.00
18	Sendang	Donorojo	Pacitan	100.00
<b>Sulawesi Selatan</b>				
1	Sanrobone	Mapakasunggu	Takalar	100.00
2	Patani	Mapakasunggu	Takalar	100.00
3	Mattompodalle	Polbang Utara	Takalar	100.00
4	Parang Luara	Polbang Utara	Takalar	100.00
5	Pa'Rappunganta	Polbang Utara	Takalar	100.00
6	Ballangloe Tarowang	Batang	Jeneponto	100.00
7	Bungeng	Batang	Jeneponto	100.00
8	Tarowang	Batang	Jeneponto	100.00
9	Balumbungang	Bontoramba	Jeneponto	100.00
10	Lentu,	Bontoramba	Jeneponto	100.00
11	Bulu Sibatang	Bontoramba	Jeneponto	100.00
12	Bonto Sunggu	Bissappu	Bantaeng	100.00
13	Bonto Cinde	Bissappu	Bantaeng	100.00
14	Bonto Rita	Bissappu	Bantaeng	100.00
15	Balumbung	Tompobulu	Bantaeng	100.00
16	Bonto-Bontoa,	Tompobulu	Bantaeng	100.00
17	Ereng-Ereng	Tompobulu	Bantaeng	100.00
<b>Lampung</b>				
1	Padang Cermin	Kedondong	Lampung Selatan	100.00
2	Panengahan	Kedondong	Lampung Selatan	100.00
3	Sukajaya	Kedondong	Lampung Selatan	100.00
4	Cugung	Rajabasa	Lampung Selatan	100.00
5	Kerinjing	Rajabasa	Lampung Selatan	100.00
6	Giri Kelopo Mulyo	Sekampung	Lampung Timur	100.00
7	Sidomukti	Sekampung	Lampung Timur	100.00
8	Trimulyo	Sekampung	Lampung Timur	100.00
9	Sukadana	Sukadana	Lampung Timur	100.00
10	Sukadana Ilir	Sukadana	Lampung Timur	100.00
11	Sukadana Pasar	Sukadana	Lampung Timur	100.00
12	Ogan Jaya	Abung Tengah	Lampung Utara	100.00
13	Ogan Campang	Abung Tengah	Lampung Utara	100.00
14	Kinciran	Abung Tengah	Lampung Utara	100.00
15	Taman Jaya	Kotabumi Selatan	Lampung Utara	100.00
16	Jerangkang	Kotabumi Selatan	Lampung Utara	100.00
17	Way Melan	Kotabumi Selatan	Lampung Utara	100.00

**Tabel 3.4**  
**Persentase Penyerapana Dana pada Desa yang**  
**Pembangunan Prasarananya belum 100%**

No	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten	Persentase dana yg sudah diterima dari total Rp. 250 juta (%)	Presentase penyelesaian fisik (%)
<b>Sumatera Utara</b>					
1	Boang Manalu	Salak	Pakpak	80.00	53.24
2	Tanjung Meriah	Sitelu Tali UJ	Pakpak	80.00	70.67
3	Kaban Tengah	Sitelu Tali UJ	Pakpak	80.00	64.90
4	Denai Lama	Pantai Labu	Deli serdang	40.00	40.90
<b>Jawa Tengah</b>					
1	Tolokan	getasan	semarang	80.00	80.00
<b>Kalimantan Barat</b>					
1	Mandor Kiru	Ngabang	Landak	40.00	85.00
2	Dara Itam	Ngabang	Landak	40.00	85.00
3	Tapang	Mempawah Hulu	Landak	40.00	70.00
4	Galar	Mempawah Hulu	Landak	80.00	70.00
5	Bani Amas	Bengkayang	Bengkayang	80.00	90.00
6	Karya Bakti	S. Betung	Bengkayang	40.00	80.00
7	Terabung	Siding	Bengkayang	0.00	25.00
<b>Nusa Tenggara Timur (*)</b>					
1	Loli	Polen	TTS	40.00	30.00
2	Laob	Polen	TTS	40.00	5.00
3	Nunkolo	Nunkolo	TTS	40.00	50.00
4	Haomeni	Nunkolo	TTS	40.00	50.00
5	Nonotbatan	Biboki Anleu	TTU	40.00	0.00
6	Sifaniha	Biboki Anleu	TTU	40.00	0.00
7	Hauteas	Biboki Utara	TTU	40.00	0.00
8	Makun	Biboki Utara	TTU	40.00	0.00
9	Dafala	Tasifeto Timur	Belu	80.00	80.00
10	Silawan	Tasifeto Timur	Belu	80.00	87.00
11	Kenebibi	Kakuluk Mesak	Belu	80.00	80.00
12	Jenilu	Kakuluk Mesak	Belu	80.00	87.00

Keterangan: Persentase dihitung berdasarkan pengamatan di lapangan karena tidak ada laporan dari OMS yang *reliable*

### 3.2. Pemilihan Lokasi Desa dan Jenis Infrastruktur

#### 3.2.1. Proses dan Penetapan Lokasi Desa Penerima Program

Pada umumnya, lokasi desa diusulkan oleh Dinas PU Kabupaten masing-masing, kecuali di Sumatera Utara yang diusulkan oleh Tim Koordinasi yang diketuai Bappeda Kabupaten. Menurut pihak Pemda Kabupaten, desa-desa yang diusulkan adalah desa yang tergolong sebagai “desa tertinggal” sebagaimana kriteria dari BPS. Dengan alasan itu pula, di Jeneponto dan Bantaeng (Sulsel) seluruh desa di wilayahnya diusulkan, karena mereka berkeyakinan seluruh desa tergolong tertinggal infrastrukturnya. Menurut ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan PKPS-BBM IP yang dikeluarkan Departemen PU, untuk

“kabupaten tertinggal” minimal 30 desa dapat diusulkan, sedangkan untuk “kabupaten tidak tertinggal” minimal 10 desa dapat diusulkan sebagai calon penerima.

Menurut informasi dari para Satker Kabupaten (sebagai narasumber), desa-desa yang diusulkan seluruhnya memang termasuk sebagai “desa tertinggal”. Dengan kata lain, desa-desa yang diusulkan bukan dilatarbelakangi oleh upaya untuk pemerataan proyek, misalnya karena belum menerima program infrastruktur lain sebelumnya.

Pengusulan lokasi desa umumnya telah dilakukan semenjak pertengahan tahun, atau jauh sebelum kenaikan harga BBM tanggal 1 Oktober 2005. Di Kalimantan Barat misalnya, pengiriman berkas usulan telah dilakukan pada sekitar bulan Juni dan Juli 2005. Nama desa-desa yang dimasukkan dalam usulan adalah desa-desa yang dianggap paling buruk kondisi infrastrukturnya. Secara umum, kondisi infrastruktur desa-desa terutama infrastruktur transportasi di wilayah ini memang perlu mendapat perhatian. Pada sebagian wilayah, jalan sungai masih menjadi andalan, sedangkan kondisi jalan darat umumnya tidak banyak yang dapat dilalui kendaraan roda empat, terutama jalan yang menghubungkan kota kecamatan dengan wilayah desa.

Juga ditemukan informasi bahwa, di seluruh kabupaten (21 kabupaten), pengajuan jumlah desa lebih banyak dari yang akhirnya direalisasikan oleh program PKPS-BBM IP ini. Proses penetapan dan keputusan desa-desa yang akhirnya memperoleh bantuan seluruhnya dilakukan oleh instansi di pusat. Meskipun tidak semua desa yang diusulkan memperoleh, namun desa yang akhirnya memperoleh sesungguhnya masih masuk dalam kategori “desa tertinggal”, dalam konteks persepsi Pemda setempat.

Di beberapa kabupaten ditemukan kasus, dimana terdapat sebagian wilayah desa yang sesungguhnya tidak diusulkan oleh pemda kabupaten. Dengan kata lain, realisasi program ditempatkan pada desa-desa di luar dari yang diusulkan. Terjadinya penetapan desa yang sejak awal tidak termasuk yang diusulkan oleh Pemda Kabupaten, tampaknya adalah hasil dari intervensi pihak elit di pusat yang mempengaruhi proses pemilihan desa lokasi program.

Diperlukan suatu ukuran atau kriteria untuk mengetahui, apakah desa yang telah menerima program tersebut, tepat sasaran. Dalam arti desa penerima tersebut telah sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan atau Juklak PKPS BBM-IP. Masalahnya, yang ditetapkan dalam Juklak terbatas pada kriteria alokasi jumlah desa penerima program yang dibedakan antara Kabupaten/Kota tertinggal dan Kabupaten/Kota non

tertinggal<sup>2</sup>. Karena itu diperlukan suatu kriteria lain untuk melihat apakah desa penerima program sudah searah dengan maksud dan tujuan program.

Pada tahun 2004 Badan Pusat Statistik (BPS), menerbitkan Buku Indeks Ketertinggalan Desa Di Indonesia. Dalam buku tersebut, dicantumkan daftar peringkat ketertinggalan seluruh desa di Indonesia dengan menggunakan tolok ukur yang sama pada masing-masing Kabupaten/Kota. Walaupun kriteria tersebut tidak menjadi acuan langsung dari PKPS BBM IP, indeks ketertinggalan desa menurut BPS tersebut, dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat ketepatan sasaran desa penerima program.

Total penerima program di 21 kabupaten sampel, sebanyak 930 desa. Jumlah tersebut merupakan 22,3% dari seluruh desa (4.170 desa). Dengan menggunakan informasi dari BPS tersebut, Tabel 3.5. memaparkan, bahwa jumlah desa yang berada di bawah rata-rata nilai ketertinggalan di kabupaten bersangkutan adalah 2.286 desa (54,8%). Jadi, jumlah desa yang menerima program di tahun 2005 lebih kurang hanya setengah dari jumlah desa yang berada di bawah nilai rata-rata ketertinggalan di kabupaten masing-masing.<sup>3</sup>

Jika diklasifikasikan berdasarkan nilai rata-rata ketertinggalan seluruh desa di kabupaten bersangkutan, maka terdapat dua kelompok yaitu desa-desa yang berada di bawah dan yang di atas nilai rata-rata. Dengan cara demikian terlihat bahwa, dari seluruh desa penerima program, 680 desa (73,1%) berada di bawah nilai rata-rata atau dapat dikatakan “sesuai” atau tepat sebagai penerima program. Sedangkan 250 desa sisanya (26,9%), skor ketertinggalannya berada di atas nilai rata-rata.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa jumlah desa penerima yang kurang sesuai atau kurang tepat sebesar 26,9%. Namun, demikian jika ketidaktepatan antar kabupaten dibandingkan, maka diperoleh rata-rata ketidaktepatan dari ke-21 kabupaten adalah 27,2%, dengan selang mulai dari 10,3% (Kabupaten TTU) dan 50% (Kabupaten Lampung Timur). Proporsi ketidaktepatan ini dapat dikatakan relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa program PKPS BBM IP di tahun 2005 telah ditempatkan di lokasi yang semestinya.

Jika dicermati antar kabupaten sampel, maka ketidaktepatan yang tinggi dan paling menonjol dijumpai di Lampung Timur (Lampung) serta Dairi dan Pakpak (Sumut). Kabupaten Dairi dan Pakpak merupakan dua wilayah yang sebelumnya adalah satu administrasi kabupaten. Sebaliknya, ketidaktepatan yang rendah ditemukan di Kabupaten TTU (NTT), Sambas (Kalbar), Banjarnegara (Jateng) dan Pacitan (Jatim).

<sup>2</sup> Buku Juklak PKPS BBM IP, 2005, hal.24-25 tentang Kriteria Penetapan Alokasi Jumlah desa

<sup>3</sup> Secara detail, lihat Buku Indeks Ketertinggalan Desa di Indonesia (BPS 2004)

**Tabel 3.5**  
**Daftar kabupaten sampel penelitian menurut jumlah desa total dan penerima per kabupaten, serta ketidaktepatan dalam penentuan lokasi**

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah Desa Dibawah Rata-Rata Indeks Kab	Total Desa Penerima PKPS	Jumlah Desa Penerima PKPS		Ketidaktepatan Sasaran (%)
					Dibawah Rata-rata Indeks Kab	Diatas Rata-Rata Indeks Kab	
NTT	TTS	215	150	58	41	17	29.3
	TTU	160	110	58	52	6	10.3
	Belu	168	107	60	47	13	21.7
Kalbar	Landak	156	78	58	44	14	24.1
	Bengkayang	85	49	44	35	9	20.5
	Sambas	182	109	64	55	9	14.1
Lampung	Lampung Utara	218	127	49	30	19	38.8
	Lampung Timur	238	138	54	28	26	48.1
	Lampung Selatan	366	206	55	38	17	30.9
Sumatera Utara	Deli Serdang	637	322	20	13	7	35.0
	Dairi & Phak-pak	161	69	72	40	32	44.4
Sulawesi Selatan	Bantaeng	66	44	40	31	9	22.5
	Jeneponto	111	61	40	30	10	25.0
	Takalar	73	35	35	23	12	34.3
Jawa Timur	Pacitan	164	89	50	41	9	18.0
	Madiun	206	93	55	43	12	21.8
	Magetan	235	130	20	16	4	20.0
Jawa Tengah	Semarang	235	146	27	17	10	37.0
	Purbalingga	238	102	20	14	6	30.0
	Banjarnegara	256	121	51	42	9	17.6
	<b>Jumlah</b>	<b>4170</b>	<b>2286</b>	<b>930</b>	<b>680</b>	<b>250</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>208.5</b>	<b>114.3</b>	<b>46.5</b>	<b>34.0</b>	<b>12.5</b>	<b>27.2</b>

Khusus untuk desa-desa yang menjadi sampel penelitian, dengan tetap mendasarkan kepada nilai rata-rata ketertinggalan di kabupaten bersangkutan, maka rata-rata ketidaktepatan sedikit lebih tinggi, yaitu 34% dengan selang antara 0%-87,5% (tabel 3.6). Kondisi ketidaktepatan di lokasi sampel merupakan hasil dari pemilihan lokasi secara acak, sebagaimana dijelaskan dalam bagian metodologi studi.

Ketidaktepatan tertinggi ditemui di Kabupaten Dairi dan Pakpak, dimana dari 8 desa